



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

*Gelar Final LBKK ke-VI
di Parlemen*

Bukti Cinta Fraksi PKS

*pada Ulama dan
Santri Ahlu Sunnah
Wal Jamaah*





Peran dan Tanggung Jawab Umat Islam dalam Menjaga Keindonesiaan

Menjadi muslim yang baik dan istiqomah berarti juga menjadi warga negara yang baik. Tidak ada pertentangan antara Islam dan ke-Indonesiaan

Islam adalah faktor penting dan utama (determinant factor) bagi ke-Indonesiaan. Sejarah pergerakan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa tidak bisa dilepaskan dari peran Islam dan umat Islam. Hal ini membawa dampak tanggung jawab yang besar bagi umat Islam Indonesia, karena sebagian besar permasalahan bangsa ada andil besar umat Islam, sekaligus berdampak besar bagi umat Islam. Pada saat yang sama, solusi atas permasalahan tersebut juga seharusnya ada andil dan kontribusi yang besar dari umat Islam.

Tanpa mengecilkkan peran komponen bangsa lainnya, Indonesia merdeka adalah berkah perjuangan ulama dan santri pejuang. Sejarah mencatat dengan tinta emas peran Lu Hasyim Hadratus Syekh KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad

Dahlan, Haji Agus Salim, Bung Tomo, Jenderal Soedirman, Laskar-Laskar Santri (Hisbullah, Sabillillah, dll.), KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Muhammad Natsir dll.

Pembentukan dasar dan konstitusi negara tidak lepas dan terpisah dari kontribusi dan pergulatan pemikiran Islam dan tokoh-tokohnya yang menerima NKRI dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU menyebut Negara Pancasila sebagai Darussalam." Sementara Muhammadiyah menyebut Negara Pancasila sebagai "Darul Ahdi wa Syahadah".

Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia jelas negara beragama karena sila pertama Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa",

yang kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 29: Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Islam adalah realitas keindonesiaan Indonesia menjadi negara muslim terbesar sekaligus negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Hal ini tidak lepas dari wajah dan karakter ajaran Islam yang washatiyah (moderat). Dengan realitas tersebut, maju dan mundurnya Indonesia, kebaikan dan permasalahan bangsa Indonesia dipengaruhi dan dikonstruisikan oleh umat Islam. Bagaimana umat Islam memosisikan diri dan mengambil peran kebangsaan yang tepat.

Pertama, umat Islam harus menjadi perekat persatuan. Indonesia adalah negara yang majemuk dalam seluruh aspeknya. Inilah kebesaran bangsa kita yang harus dijaga persatuannya.

Kedua, umat Islam harus menjadi penjaga identitas dan karakter bangsa. Indonesia memiliki karakter khas yaitu Pancasila yang harus kita jaga bersama. Cara paling tepat untuk menjaganya adalah dengan mengamalkan sila-silanya secara konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, umat Islam harus menjadi motor penggerak kemajuan. Umat Islam harus menjadi solusi di tengah tantangan kebangsaan untuk memperbaiki praktik demokrasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengatasi permasalahan

kemiskinan, pemerataan pembangunan, masalah moralitas, etika, korupsi, termasuk masalah radikalisme-terorisme di satu sisi dan liberalisasi/sekularisasi di sisi yang lain.

Menjadi muslim yang baik dan istiqomah berarti juga menjadi warga negara yang baik. Tidak ada pertentangan antara Islam dan ke-Indonesiaan. Jika ada pengakuan beragama Islam tapi membawa ketidakmudahan bagi bangsa, termasuk menebarkan kebencian dan permusuhan, kerusakan dan kehancuran, menerbitkan teror dan ancaman, maka itu bukan Islam. Demikian sebaliknya, pengakuan Islam seraya menginjak-injak dan merendahkan ajarannya, juga bukan Islam. Itu semua bukan karakter wasathiyah Islam yang mengokohkan ke-Indonesiaan sebagaimana diajarkan oleh Rosulullah SAW

Gelar Final LBKK ke-VI di Parlemen,

Bukti Cinta Fraksi PKS pada Ulama dan Santri Ahlu Sunnah Wal Jamaah

KUTIPAN

Jakarta (19/11) — Fraksi PKS DPR kembali menggelar Final Lomba Baca Kitab Kuning Edisi ke-6 di Gedung Parlemen DPR Senayan Jakarta. Acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian Peringatan Hari Santri Nasional.

Berbeda dari dua tahun terakhir, acara kali ini digelar secara offline menghadirkan 24 finalis dari 24 provinsi yang menyisihkan 2.914 peserta lainnya.

Acara diantarkan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Syura sekaligus Wakil Ketua MPR RI H.M. Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Ahmad Syaikh, Ketua MPP PKS Suswono, Sekretaris Majelis Syura PKS Sekretaris Abdul Aziz, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabisyi. Tampil menyegarkan suasana Komika Mamat Alkatiri.

Adapun kitab yang dilombakan adalah Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Dewan Juri lomba yaitu

مسابقة لكتابنا سنه ٢٠٢٢
BABAK FINAL
LOMBA BACA
KITAB
KUNING
TINGKAT NASIONAL
EDISI VI TAHUN 2022

KH. Syuhada' Syarkun, MHI (Wakil Kepala Madrasah Aliyah Tebuireng 2009-2012), Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA (Ketua Umum MAPADI/Alumni Pesantren Langitan Tuban), Dr. KH. Ali Akhmad, MA Alhafidz (Ketua BPU DPP PKS/Alumni Pesantren Raudlatul Ulum Pati, Jawa Tengah).

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Lomba Baca Kitab Kuning bukan program politik jangka pendek tapi berangkat dari keikhlasan untuk memuliakan ulama, santri dan pesantren. Hal ini bentuk konsistensi keberpihakan dan penghormatan kepada ulama dan santri ahlu sunnah wal jamaah yang sangat besar kontribusinya dalam menjaga NKRI sejak jaman kemerdekaan.

Anggota Komisi I DPR ini sedikit bercerita tentang inisiatif awal Lomba Baca Kitab Kuning di Parlemen ini yang berasal dari risalah yang disampaikan secara khusus kepada Kyai Haji Sholahuddin Wahid (Gus Sholah).

"Waktu saya sampaikan niat untuk mengadakan Lomba Baca Kitab Kuning di DPR RI ini, disambut baik oleh Gus Sholah pada saat itu. Dikatakan bagus sekali, tidak pernah ada fraksi lain yang pernah mengadakan lomba semacam ini di DPR RI. Atas motivasi tersebut, Fraksi PKS semakin kokoh memperjuangkan pesantren di DPR salah satunya dengan



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"PKS concern mendorong generasi muda meningkatkan literasi melalui baca kitab, bukan hanya kitab kuning tapi juga kitab-kitab lain sehingga berkontribusi bagi kemajuan Indonesia".

lahirnya UU 18/2019 tentang Pesantren dan mendasar porsi APBN dan APBD untuk pesantren," pungkas Jazuli.

Teladani Ulama
Presiden PKS Ahmad Syaikh dalam sambutannya sebelum meresmikan acara mengatakan

Lomba Baca Kitab Kuning Fraksi PKS merupakan upaya PKS untuk melestarikan tradisi pesantren sekaligus literasi di kalangan generasi muda bangsa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Salim Harap LBKK Bisa Motivasi Generasi Muda Tak Hanya Unggul Tapi Berakhlak Mulia

KUTIPAN

Jakarta (19/12) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membuka Lomba Baca Kitab Kuning Tingkat Nasional Edisi VI Tahun 2022 pada Senin, (19/12).

Acara LBKK yang diselenggarakan langsung di Gedung Nusantara III tersebut resmi dibuka oleh Ketua Majelis Syuro oleh Dr. Salim.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Salim menyampaikan puji syukur atas terlaksananya LBKK hingga pada tingkat nasional ini.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan rasa bangga dan sukacita, atas penyelenggaraan Lomba Baca Kitab Kuning Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Edisi ke-6," ucapnya.

LBKK tingkat nasional ini merupakan lomba dalam rangka memperingati hari santri nasional. Para peserta yang terlibat merupakan para peserta yang telah mengikuti proses seleksi yang ketat di tingkat Kabupaten dan tingkat

generasi bangsa, agar mencintai ilmu agama, dan ulama ahlusunnah wal jamaah," tutur Dr. Salim.

Ia berharap bahwa LBKK yang diselenggarakan tersebut akan menciptakan generasi-generasi yang tidak hanya unggul tetapi juga sekaligus berakhlak mulia.

"Lomba ini juga merupakan sebuah upaya PKS untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia yang religius, sekaligus upaya untuk memajukan pesantren sebagai toko guru pendidikan Indonesia," ungkapnya.

"Sehingga dari pesantren yang jumlahnya menurut data Kemenag tahun ini, 26,975 dengan jumlah santri tak kurang dari 4,5jt orang akan lahir pemimpin dan masyarakat yang cerdas, berintegritas, bertakwa, dan berakhlak mulia," tutupnya.

مسابقة قراءة الكتاب
سنة ١٤٤٤ هـ

BABAK FINAL

**LOMBA BACA
KITAB
KUNING**
TINGKAT NASIONAL
EDISI VI TAHUN 2022

Provinsi.

Acara tersebut juga merupakan rutinitas dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai bentuk tanggung jawab untuk melestarikan generasi yang beragama, mencintai bangsa dan ulama ahlusunnah wal jamaah.

"Lomba baca kitab kuning ini adalah bagian dari tanggung jawab Partai untuk memotivasi



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syuro PKS

"Lomba ini juga merupakan sebuah upaya PKS untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia yang religius, sekaligus upaya untuk memajukan pesantren sebagai toko guru pendidikan Indonesia, Sehingga dari pesantren yang jumlahnya menurut data Kemenag tahun ini, 26,975 dengan jumlah santri tak kurang dari 4,5jt orang akan lahir pemimpin dan masyarakat yang cerdas, berintegritas, bertakwa, dan berakhlak mulia"

مسابقات قرآنية الكتاب مفتوح العين

BABAK FINAL
LOMBA BACA
KITAB
KUNING
TINGKAT NASIONAL
EDISI VI TAHUN 2022

PEMENANG

BABAK FINAL

LOMBA BACA KITAB KUNING VI 2022

19 Desember 2022

FRAKSI
PKS
DPR RI



PEMENANG	PESANTREN	NILAI	HADIAH
 JUARA 1 Faisal Khumaidi PROVINSI JAWA TENGAH	Ponpes Attauhid- dijyah Syekh Said bin Armia Jateng	705	UMRAH SENILAI Rp 35.000.000
 JUARA 2 Fahmi Rahman PROV. KALIMANTAN SELATAN	Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan	702	Rp 30.000.000
 JUARA 3 Ahmad Syakir PROV. SUMATERA SELATAN	Ponpes Rubath Al Muhibbien Sumatera Selatan	701	Rp 25.000.000
 JUARA HARAPAN 1 Said Munazir A. PROVINSI ACEH	Ponpes Dayah Safinatunnajah Nagan Raya, Aceh	698	Rp 20.000.000
 JUARA HARAPAN 2 Ifkar Rasyid PROVINSI SUMATERA BARAT	Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sumatera Barat	697	Rp 15.000.000
 JUARA HARAPAN 3 Sunnatulloh PROVINSI KEP. BABEL	Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Qur'an Ke. Bangka Belitung	696	Rp 10.000.000



Terselenggara
Dalam Rangka
Hari Santri
Nasional 2022
dan Milad Ke 18
Fraksi PKS DPR RI



PKS Lestarikan Tradisi Pesantren dengan Lomba Baca Kitab Kuning ke-VI

KUTIPAN

Jakarta (19/12) — Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Final Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) 2022 yang telah memasuki periode ke-VI di Ruang Abdul Muis Nusantara II, Kompleks DPR RI Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin, (19/12).

مسابقة قراءة الكتاب فتح العين

BABAK FINAL

**LOMBA BACA
KITAB
KUNING**
TINGKAT NASIONAL
EDISI VI TAHUN 2022

LBKK Fraksi PKS ini, ungkap Syaikh, diselenggarakan setiap tahun dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional.

"Fraksi PKS ingin mengajak generasi bangsa untuk mendalami ilmu agama melalui rujukan utama karya

ulama ahlu sunnah yang muhtabar sekaligus meneladani keikhlasan, ke-tawadhu-an, dan pengorbanan para ulama bagi bangsa Indonesia," ungkapnya.

Syaikh menambahkan Lomba baca kitab kuning Fraksi PKS ini memotivasi generasi bangsa untuk mempelajari agama secara mendalam dari sumber rujukan yang terpercaya karya ulama-ulama ahlu sunnah.

"Dengan adanya LBKK ini saya berharap bahwa acara ini digelar untuk meningkatkan kemampuan literasi generasi bangsa," Anggota Komisi I DPR RI.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

"Fraksi PKS ingin mengajak generasi bangsa untuk mendalami ilmu agama melalui rujukan utama karya ulama ahlu sunnah yang muhtabar sekaligus meneladani keikhlasan, ke-tawadhu-an, dan pengorbanan para ulama bagi bangsa Indonesia,"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Pemberian Gelar Letkol Tituler Deddy Corbuzier, Aleg PKS: Kegiatan Influencer Agar Tidak Kontraproduktif Dengan Reputasi TNI

KUTIPAN

Jakarta (12/12) --- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf menanggapi mengenai pemberian gelar Letkol Tituler kepada YouTubers Deddy Corbuzier oleh Menteri Pertahanan.

Menurut Muzzammil, pangkat Tituler berdasar atas PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit. Pasal 5 ayat 2 Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yakni pangkat efektif dan pangkat khusus yang terdiri atas pangkat lokal dan pangkat tituler.

"Pasal 29 (1) Warga Negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI diberi pangkat tituler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf b," sebutnya.

Kedua, imbuh Muzzammil, penggunaan pangkat tituler hanya berlaku selama yang bersangkutan memangku jabatan keprajuritan yang menjadi dasar pemberian Pangkat tersebut dan mendapat perlakuan administrasi terbatas.

"Ketiga, Warga Negara yang diberi pangkat tituler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hukum militer dan berada dalam kewenangan peradilan militer sebagaimana yang berlaku bagi Prajurit," ungkapnya kepada media,

Senin, (12/12).

Sisi positifnya, kata Muzzammil, adalah bagus untuk mensosialisasikan lebih masif tupoksi TNI ke Publik dan juga berbagai keberhasilan TNI. Karena Deddy Corbuzier sangat aktif di media khususnya medsos dengan follower yang berjumlah besar.

"Yang jadi dilema atau permasalahan adalah kalau Deddy menunjukkan sikap-sikap pribadinya sebagai Influencer saat dialog dengan berbagai narasumber yang beragam yang sikapnya tidak sejalan dengan sikap TNI dan atau hal-hal sensitif di publik seperti yg pernah terjadi saat wawancara Deddy tentang isu LGBT. Jika ada hal sejenis ini pasti ada kritik publik dan pihak TNI juga dipaksa untuk melakukan klarifikasi," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Komisi I DPR RI

Yang jadi dilema atau permasalahan adalah kalau Deddy menunjukkan sikap-sikap pribadinya sebagai Influencer saat dialog dengan berbagai narasumber yang beragam yang sikapnya tidak sejalan dengan sikap TNI dan atau hal-hal sensitif di publik seperti yg pernah terjadi saat wawancara Deddy tentang isu LGBT. Jika ada hal sejenis ini pasti ada kritik publik dan pihak TNI juga dipaksa untuk melakukan klarifikasi,"

Wakil Ketua FPKS: Sebagai Bangsa Besar, Indonesia **Tak Perlu** Mengemis Permintaan Maaf dari Belanda

KUTIPAN

Jakarta (23/12) --- Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte telah mengajukan permintaan maaf resmi atas nama negara Belanda terkait peran negara itu dalam perdagangan budak.

Hal ini dilakukan setelah kabinetnya melakukan perjalanan ke tujuh bekas koloni Negeri Kincir Angin di Amerika Selatan dan Karibia. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menyayangkan pemerintah Belanda tidak secara eksplisit menyampaikan permintaan maaf terkait praktek perbudakan tersebut kepada Indonesia.

"Mengherankan, Indonesia sebagai wilayah terbesar yang alami penjajahan dan praktek perbudakan Belanda selama ratusan tahun tidak disebutkan. Beberapa kali permintaan maaf Pemerintah Belanda hanya ditujukan terkait kekerasan

ekstrem yang terjadi di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia selama periode 1945-1949. Sebagai Negara, Indonesia secara resmi memang baru ada tahun 1945, tetapi sebagai bangsa, Indonesia sudah sejak sebelum Belanda menjajah," terang Sukamta.

Oleh sebab itu Wakil Ketua Fraksi PKS ini berpendapat Pemerintah Indonesia perlu membentuk tim panel yang terdiri dari ahli sejarah, ahli hukum dan juga aktivis HAM untuk menyusun data dan fakta sejarah yang menunjukkan praktek perbudakan dan penindasan Belanda pada

masa kolonialisme.

"Sebagai bangsa besar, kita tidak perlu mengemis permintaan maaf. Tetapi fakta kelam praktek penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda yang berlangsung selama 300 tahun harus diakui oleh Belanda dan diketahui oleh dunia. Ini penting dilakukan sebagai pengingat, untuk menjauhkan praktek penjajahan karena menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan," pungkasnya.

Namun demikian, Sukamta juga berharap Pemerintah Indonesia juga memberikan respon secara resmi terhadap beberapa kali permintaan maaf yang disampaikan oleh Pemerintah Belanda terkait kekerasan ekstrem yang terjadi di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Permintaan maaf tersebut disampaikan pada awal tahun 2022 oleh PM Rutte dan Raja Willem-Alexander pada tahun 2020 ketika berkunjung ke Jakarta.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Sebagai bangsa besar, kita tidak perlu mengemis permintaan maaf. Tetapi fakta kelam praktek penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda yang berlangsung selama 300 tahun harus diakui oleh Belanda dan diketahui oleh dunia. Ini penting dilakukan sebagai pengingat, untuk menjauhkan praktek penjajahan karena menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan,"

"Kalau persoalan belum merespon karena sikap Belanda yang akui Indonesia baru eksis mulai 27 Desember 1949 saat Konferensi Meja Bundar (KMB), mestinya pemerintah perlu sampaikan sikap kepada Belanda untuk

mengakui 17 Agustus 1945. Respon secara resmi perlu dilakukan sebagai upaya menjaga relasi dan kerjasama antar dua negara," tutup Anggota DPR RI Dapil Yogyakarta ini.

KPU Tentukan Dapil Caleg Usai Putusan MK, Aleg PKS: Bisa Merubah Banyak Hal!

KUTIPAN

MK memutuskan hal tersebut setelah menyetujui gugatan uji materi yang diutarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk ketentuan Pasal 187 ayat (5) dan 189 ayat (5) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mengatur soal pendapilan.

Jakarta (21/12) – Anggota Komisi II dari Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan pendapatnya mengenai pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menentukan daerah pemilihan (Dapil) calon legislatif (Caleg) Pemilu 2024 usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Mardani dalam cuitan twitter pada 21 Desember lalu.

Sebelumnya, MK telah memutuskan daerah pemilihan legislatif tingkat DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta

kabupaten/kota akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MK memutuskan hal tersebut setelah menyetujui gugatan uji materi yang diutarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk ketentuan Pasal 187 ayat (5) dan 189 ayat (5) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mengatur soal pendapilan.

Menanggapi pernyataan KPU, Mardani mengungkapkan bahwa keputusan tersebut bisa merubah banyak hal karena sifatnya final.

“Keputusan yang bisa merubah banyak hal. Karena sifatnya final dan mengikat maka wajib segera menindaklanjuti. Dan masih ada waktu melakukan kajian matang agar dapil dapat merepresentasikan keadilan dan faktual, sesuai kondisi di lapangan.” Ujar Mardani

Mardani menambahkan bahwa Komisi II harus segera mengawal keputusan ini. “Komisi II mesti mengawal keputusan ini agar proporsional dan adil.” Tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta 1.



“Keputusan yang bisa merubah banyak hal. Karena sifatnya final dan mengikat maka wajib segera menindaklanjuti. Dan masih ada waktu melakukan kajian matang agar dapil dapat merepresentasikan keadilan dan faktual, sesuai kondisi di lapangan



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

Legislator PKS Sampaikan Rencana Pembahasan RUU Konservasi SDA Ekosistem

KUTIPAN

Jakarta (06/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan beberapa isu yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II pada Selasa (06/12).

Saat ditemui, Johan menyampaikan isu yang akan dibahas, salah satunya yang sedang hangat, yaitu mengenai Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP).

“Agenda Rapat Paripurna hari ini yaitu penetapan Panglima TNI. Namun, bisa saja ada beberapa interupsi dari beberapa anggota sesuai dengan tingkatan urgensinya dan apakah pimpinan akan memberi kesempatan atau tidak”, ujar Johan.

Diluar pembahasan Rapat Paripurna mengenai pengesah-

an RUU KUHP, Johan juga menambahkan mengenai pembahasan isu yang saat ini sedang dibahas di Komisi IV DPR RI.

Dalam hal ini, Johan menyampaikan mengenai persiapan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (RUU KSDAE).

Banyak hal yang saat ini menjadi pembahasan di Komisi 4. Hal yang pertama ingin diselesaikan ialah Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai observasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (RUU KSDAE)”, pungkask Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

“Agenda Rapat Paripurna hari ini yaitu penetapan Panglima TNI. Namun, bisa saja ada beberapa interupsi dari beberapa anggota sesuai dengan tingkatan urgensinya dan apakah pimpinan akan memberi kesempatan atau tidak”,

Bersikeras Impor Beras Diakhir Tahun, Aleg PKS Tagih Janji Pemerintah Serap Beras Dalam Negeri

KUTIPAN

Jakarta (06/12) --- Rencana Impor beras pada Desember 2022 mendapat sorotan tajam dari Anggota DPR RI Komisi IV, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP. MM. “Di ujung tahun kok malah Impor Beras,” katanya.

Politisi PKS ini sangat menyayangkan tindakan pemerintah yang sudah membayar secara resmi beras impor. Bahkan menurut info yang didapatkan, beras impor ini akan masuk ke tanah air di bulan desember 2022 untuk memenuhi pasokan CBP di gudang Perum Bulog, yang saat ini berkurang.

Akmal mengatakan, Komisi IV sudah melakukan berbagai tindakan evaluasi, pengawasan terhadap Kementerian pertanian, Bulog, ID Food dan PT Pupuk Indonesia. Bahkan menurutnya, lembaga-lembaga yang berkaitan untuk memastikan ketersediaan beras nasional ini dalam satu forum yang sama di komisi IV.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, panen raya yang merupakan siklus tahunan di periode Februari-April 2022 dan Juli-Agustus mestinya dapat dioptimalkan dari sisi manajemen stok dan distribusinya.

“Saya ini mendapat masukan dan keluhan dari berbagai petani maupun lembaga petani akan wacana impor beras yang sudah dipastikan oleh pemerintah. Mendang sudah bicara, menteri BUMN sudah bicara, Kabulog bicara bahkan terakhir pak Wapres bicara wacana impor beras yang hampir dipastikan terjadi di penghujung tahun 2022. Impor beras ini menyakitii Petani pak,” Tegas Akmal.

Anggota DPR yang kini di Badan Anggaran ini menyarankan pemerintah, Kalau pun mesti impor beras, jangan beras yang di impor. Mesti dipikirkan bila ambil produk dari luar negeri apalagi pangan utama, harus dapat menciptakan pekerjaan baru pada sektor pengolahan, industri turunan, dan pengangkutan.

“Gabah yang diimpor, negara dapat bahan gabah sepanjang tahun untuk digiling sehingga beras di dapatkan, bekatul dimiliki, ada menir dan sekam. Selain itu, penyimpanan gabah lebih murah biayanya dibandingkan penyimpanan beras,” pungkasnya.

Akmal menambahkan, produk turunan gabah yang jumlahnya ribuan ton, akan dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bisa juga sebagai bahan bata tahan api, silika dan lain sebagainya.

Pria kelahiran Bone ini mempertanyakan, janji kementerian pertanian di rapat terakhir ketika RDP eselon 1 kementerian yang juga hadir dirut



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

“Kita sudah sering dapat janji tinggal janji. Janji untuk tidak impor beras pada panen raya Agustus lalu, janji pasokan stok beras dalam negeri pekan lalu. Semua lips Service pemerintah, dan saling bertolak belakang. Kini bahkan sekelas wapres angkat bicara meyakinkan pentingnya impor beras,”

bulog, kepala Bapanas, ID Food dan PT Pupuk yang menyatakan kesediaannya memasok stok gudang bulog dari gudang petani. Janji ini seharusnya terealisasi pekan akhir November atau awal desember.

“Kita sudah sering dapat janji tinggal janji. Janji untuk

tidak impor beras pada panen raya Agustus lalu, janji pasokan stok beras dalam negeri pekan lalu. Semua lips Service pemerintah, dan saling bertolak belakang. Kini bahkan sekelas wapres angkat bicara meyakinkan pentingnya impor beras,” tutup Andi Akmal

Serap Beras Petani Rendah

Legislator PKS Tolak Indonesia Impor 600 Ribu Ton Beras

KUTIPAN

Serap Beras Petani Rendah, Legislator PKS Tolak Indonesia Impor 600 Ribu Ton Beras

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, drh Slamet di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Pemerintah melalui Perum Bulog sepakat untuk mengimpor beras sebesar 600 ribu ton mengingat semakin pentingnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diakhir tahun ini.

Tahapan Impor beras ini akan dibagi menjadi beberapa termin sampai stok CBP terpenuhi. Menurut Kepala Bulog Budi Wasoso, impor beras ini dilakukan untuk mengamankan stok CBP yang mulai menipis yakni tersisa hanya 500 ribu ton atau dibawah standar Stock CBP sebesar 1,2 - 1,5 juta ton.

Slamet secara tegas menolak rencana pemerintah tersebut, karena menurutnya

impor beras kali ini merupakan eksekusi dari buruknya tata kelola beras nasional yang terlihat dari rendahnya data serapan perum bulog saat panen raya (Bulan Maret hingga Mei) yang hanya mencapai sekitar 41 ribu ton saja sehingga bulog tidak bisa mengamankan stok CBP di akhir tahun.

Meskipun data BPS yang juga diadopsi oleh Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa terdapat surplus beras 1,7 juta ton yang tersebar di masyarakat, namun Bulog tetap kesulitan menyerap beras petani karena harganya yang sudah melambung jauh sehingga pemerintah harus melakukan impor.

"Seharusnya pemerintah duduk bersama untuk

menentukan kebijakan beras nasional khususnya dalam menyambut panen raya yang merupakan kesempatan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah," tegas Slamet.

Politisi senior PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya sudah memetakan persoalan beras ini sejak awal. Data BPS dan Kementan menunjukkan ada surplus beras nasional namun Bulog masih impor beras tentu saja ini tamparan bagi pemerintah yang mengklaim terjadinya kecukupan beras nasional dan tidak pernah impor beras lagi seperti yang berulang kali disampaikan presiden Jokowi sendiri.

Ia juga menyatakan bahwa kurang cairnya komunikasi antar lembaga, khususnya terkait data merupakan salah satu alasan teknis yang kerap terjadi dalam pengambilan keputusan.

"Selain itu penyerapan bulog yang cukup rendah pada masa panen raya. Di sisi yang lain, data kementan juga masih harus diverifikasi di lapangan karena ada simpangan perbedaan data yang cukup besar selama proses verifikasi yang dilakukan bulog. Misalnya data kementan menunjukkan ada data 65.000 ton di penggilingan, namun setelah diverifikasi hanya terdapat sekitar 500 ton," tutup Slamet.

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Pemerintah seharusnya sudah memetakan persoalan beras ini sejak awal. Data BPS dan Kementan menunjukkan ada surplus beras nasional namun Bulog masih impor beras tentu saja ini tamparan bagi pemerintah yang mengklaim terjadinya kecukupan beras nasional dan tidak pernah impor beras lagi seperti yang berulang kali disampaikan presiden Jokowi sendiri.”



Bersikukuh Impor Beras, Aleg PKS: Tanda Pemerintah Tak Peduli Petani!

KUTIPAN

Jakarta (15/12) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, prihatin dengan heboh tarik ulur perbedaan data stok beras antara Kementerian Pertanian dengan Bulog dan ID Food yang berujung keputusan Pemerintah hendak impor beras.

Hermanto menegaskan bahwa impor beras tersebut sangat menyakitkan petani domestik.

"Tiba-tiba saja ada keputusan impor beras. Ini jelas, Pemerintah abai dengan pembelaan terhadap petani domestik," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Menurut Hermanto, keputusan impor mengindikasikan ketidakberpихanan pemerintah pada petani.

"Padahal selama ini petani telah bersusah payah bercocok tanam secara serius mengikuti apa yang menjadi arahan Pemerintah untuk mencapai target produksi beras," tambah Legislator dari FPKS DPR RI ini.

Silang sengketa perbedaan data stok beras, lanjutnya, mestinya tidak serta merta mengambil jalan pintas untuk impor.

"Pemerintah mesti kreatif dan inovatif mengembangkan sektor hulu dan hilir bidang pertanian melalui teknologi modern dan sistem data pangan yang integratif, konsolidatif dan validatif sehingga hanya satu data saja yang dimiliki

Pemerintah," papar Hermanto. Kebijakan impor beras itu, katanya, sangat bertentangan dengan seruan Presiden Jokowi.

"Presiden menghendaki kebutuhan beras dipenuhi dari produksi dalam negeri," ucap

Hermanto.

Z Sebelum, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menginfokan Pemerintah sudah membeli beras impor sebanyak 200 ribu ton. Jumlah beras itu belum masuk ke Indonesia tetapi baru disiapkan, sewaktu-waktu bila diperlukan bisa langsung impor. Beras impor itu merupakan beras cadangan pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang Bulog.

Lebih jauh terkait ketersediaan beras khususnya dan pangan umumnya yang berasal dari produksi dalam negeri, Hermanto minta langkah proaktif Holding BUMN Pangan atau ID Food.

"ID Food mesti bersinergi dengan instansi terkait dan hadir langsung di pasar nasional. ID Food berperan membantu pemerintah dalam mengatur logistik dengan memastikan barang ada dan harganya terjangkau," tuturnya.

Holding BUMN Pangan terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/ PPI, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, PT Garam dan PT Rajawali Nusantara Indonesia/ RNI sebagai Induk Holding BUMN Pangan.

"Holding BUMN Pangan mestinya menyusun kebijakan strategis dan roadmap untuk mewujudkan kedaulatan pangan sesuai amanat UU Pangan. Salahsatunya merealisasikan swasembada beras," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah mesti kreatif dan inovatif mengembangkan sektor hulu dan hilir bidang pertanian melalui teknologi modern dan sistem data pangan yang integratif, konsolidatif dan validatif sehingga hanya satu data saja yang dimiliki Pemerintah"

Mayoritas Rakyat Indonesia Tak Bisa Akses Makanan Bergizi,

PKS: CATATAN MERAH BAGI PEMERINTAH!



Mayoritas masyarakat Indonesia diketahui tidak bisa mengakses kebutuhan makanan bergizi atau makanan sehat.

Daerah dengan persentase tertinggi penduduk yang tidak bisa mengakses makanan bergizi

Uang yang perlu dikeluarkan setiap orang untuk membeli makanan bergizi di Indonesia

Rp 22.126 per hari
atau **Rp 663.791** per bulan.

183,7 juta orang Indonesia yang pengeluaran bulannya tergolong terlalu kecil untuk dapat memenuhi angka tersebut.

Penduduk Indonesia yang tidak mampu membeli makanan bergizi:



Antisipasi Kecelakaan Lalin Jelang Akhir Tahun, Aleg PKS Minta Ditjen Hubdar **Perkuat Koordinasi**

KUTIPAN

Jakarta (21/12) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS menyebutkan periode libur panjang akhir tahun selalu digunakan masyarakat untuk berwisata atau mudik.

Menurut Toriq, pergerakan kendaraan secara masif akan meningkatkan potensi kecelakaan. Karenanya ia menghimbau pemudik agar selalu waspada dan memahami risiko berkendara.

“Diperkirakan sebanyak 22,4 persen penduduk Indonesia atau sekitar 60,6 juta orang akan melakukan mobilitas pada pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Besarnya jumlah pergerakan akan berbanding lurus dengan peningkatan potensi terjadinya kecelakaan. Karenanya pemegang regulasi harus dapat meminimalisir. Para pemudik juga perlu waspada,” tutur Toriq Hidayat asal Fraksi PKS.

Selain data Survei Badan

Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan diatas, Politisi PKS menuturkan dalam Journal of Physics: Conference Series pada 2019 (Setiawan dan Sudecanto), kecelakaan di Jabodetabek periode 2014 sampai dengan 2017, di bulan Desember selalu lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

“Intensitas hujan yang tinggi di akhir tahun menjadi faktor potensi kecelakaan. Umumnya geografis destinasi wisata Indonesia tergolong rentan saat curah hujan tinggi. Air yang meluap ke jalan, longsor pada bagian tebing, licin, dan lain sebagainya. Kondisi ini perlu antisipasi dini oleh pemerintah, terutama terkait kesiapan kendaraan

ataupun awak pendukungnya,” kata Toriq.

Senada dengan pakar ergonomi kognitif dari Institut Teknologi Bandung, Aleg PKS asal tasik juga mengatakan, sebanyak 61 persen penyebab kecelakaan karena faktor manusia, 30 persen faktor sarana prasarana, dan 9 persen faktor kendaraan.

“Karenanya saya minta dengan sangat agar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi dengan Korps Lalu Lintas Polri, dan pengelola jalan tol. Memastikan aturan keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru ini dijalankan dengan benar di lapangan,” tutup Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Besarnya jumlah pergerakan akan berbanding lurus dengan peningkatan potensi terjadinya kecelakaan. Karenanya pemegang regulasi harus dapat meminimalisir. Para pemudik juga perlu waspada”

Tolak Kenaikan Tarif KRL, Aleg PKS: Bisa Beratkan Masyarakat!

KUTIPAN

Jakarta (16/12) --- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama merespon Pemerintah yang berencana menaikkan tarif commuter line kereta rangkaian listrik (KRL) Jabodetabek tahun depan.

Tarif KRL diperkirakan naik menjadi Rp 5.000 untuk 25 km pertama dan untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap di angka Rp 1.000. Wacana ini dilontarkan dengan beberapa alasan.

Pertama, tarif KRL belum pernah naik sejak tahun 2015. Kedua, peningkatan tarif operasional selalu dan pasti terjadi setiap tahunnya, sehingga subsidi PSO (Public Service Obligation atau Kewajiban Pelayanan Publik) terus bertambah.

Pemerintah menganggap daripada untuk subsidi PSO, akan lebih produktif jika disalurkan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan pelayanan perkeretaapian di seluruh Indonesia.

Ketiga, kenaikan tarif ini sudah sesuai dengan survey yang dilakukan pada masyarakat pada bulan Januari 2022 yang lalu.

"FPKS dengan tegas menolak kenaikan tarif KRL pada tahun 2023. Alasan-alasan di atas dianggap belum cukup kuat untuk menaikkan tarif dan akan membebankan masyarakat," tegas SJP.

Alasan pertama, imbuhnya, bahwa tarif KRL belum pernah naik sejak tahun 2015 sangat lemah dasar hukumnya karena UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sama sekali tidak menyebutkan periode evaluasi dan penyesuaian tarif.

"Hal ini berbeda dengan tarif jalan tol yang evaluasi dan

penyesuaiannya dilakukan setiap dua tahun sekali yang memang disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Yang ada adalah bahwa besaran tarif harus diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan seperti disebutkan dalam Permenhub No. PM 17 Tahun 2018. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap periode tertentu harus ada kenaikan tarif KRL," terang Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.

Alasan tarif KRL belum pernah naik sejak tahun 2015 sehingga pantas jika naik, kata SJP, adalah juga absurd mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2015 tidak pernah lebih dari 6 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan tahun 2020 mencapai minus 2,07 persen, lalu tahun 2021 baru beranjak naik ke 3,69 persen sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Apalagi Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa pada tahun 2023 mendatang akan terjadi krisis sehingga menjadi tahun yang suram," pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 masih sangat tinggi, yaitu mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia.

"Selain itu inflasi yang terjadi secara global turut mengerek naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.
Anggota Komisi V DPR RI

"FPKS dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif dasar KRL menjadi Rp5.000 karena alasan-alasan yang dikemukakan Pemerintah belum kuat dan akan membebankan masyarakat pada tahun 2023."

masyarakat," tutur SJP.

Alasan kedua, kata Suryadi, bahwa anggapan Pemerintah daripada untuk subsidi PSO, akan lebih produktif jika disalurkan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan pelayanan perkeretaapian juga tak memiliki dasar hukum. PSO

(Public Service Obligation atau Kewajiban Pelayanan Publik) sebagai tanggung jawab Pemerintah jelas-jelas tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 153 ayat (1).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan

Politisi PKS Tegas Pertanyakan Impor Beras untuk Siapa

KUTIPAN

Jakarta (21/12) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS meminta Menteri Perdagangan dan Bulog jujur soal importasi beras terkait apa yang dijadikan dasar dibalik keputusan impor.

Amin menyoroti 'keukeuhnya' pemerintah mengimpor beras, yang Senin (16/12) lalu sudah direalisasikan sebesar 5.000 ton dari rencana 500 ribu ton. Menurut Amin jika pengendalian harga beras dilakukan dengan cara impor itu sih mudah dan instan. Persoalannya, impor beras ditengah produksi petani sendiri yang berlebih, itu bukan langkah bijak karena mengganngu penyerapan beras petani.

"Kebijakan impor beras merupakan pukulan berat bagi petani karena menekan harga beras petani. Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor," ungkapnya.

Kewajiban pemerintah untuk mencari strategi yang tepat tanpa harus mengorbankan petani dan kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan

swasembada pangan.

"Kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola beras nasional karena saat ini stok beras justru naik. Ini juga memperlakukan pemerintah sendiri karena beberapa waktu lalu mengklaim sudah 3 tahun Indonesia tidak mengimpor beras alias sudah tercapai swasembada tapi klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta", kata Amin.

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV itu pun prihatin dengan kisruh data perberasan nasional yang muncul setiap tahun. Harmonisasi data pangan, informasi pangan serta akuntabilitas neraca komoditas pangan tidak pernah diselesaikan.

"Keputusan Kemendag untuk impor beras disebutkan

karena cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog menipis hingga tersisa 570 ribu ton dari batas minimal yang dianggap aman sebesar 1,2 juta ton. Impor dilakukan untuk menambah stok CBP. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini terjadi surplus beras sebesar 1,7 juta ton. Produksi beras sepanjang tahun ini mencapai 31,90 juta ton, sedangkan konsumsi nasional 30,20 juta ton. Selain itu, konsumsi beras per kapita trennya juga menurun," jelasnya.

Di sisi lain, data perberasan semestinya semakin bagus dan akurat, pantauan luas tanam dan luas panen pun sudah didukung dengan penggunaan satelit. Artinya, kata Amin, jika alasan impor beras karena kekurangan pasokan, maka kemampuan Bulog mengamankan cadangan beras dengan menyerap produksi petani dipertanyakan.

"Pemerintah seharusnya mencari akar masalah dari merosotnya CBP yang dikelola Bulog. Tren rendahnya serapan Bulog itu sudah terjadi sejak Juli 2022, mengapa tidak diantisipasi pemerintah sejak dini?" kata Amin.

Kalau dirunut akar masalahnya, tingginya harga pembelian pemerintah (HPP) menjadi penyebab merosotnya daya serap Bulog terhadap gabah petani. Namun tingginya HPP gabah, juga tidak benar-benar dinikmati oleh petani.



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola beras nasional karena saat ini stok beras justru naik"

Adanya peningkatan biaya produksi akibat faktor eksternal menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan petani semakin tinggi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu kenaikan biaya bahan baku dan biaya pendukung lainnya, selain faktor depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga benih, lahan,

dan pupuk.

"Alokasi anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2022 ini mencapai Rp94,1 triliun. Masa iya para menteri dan Menko terkait tidak bisa berkoordinasi dan bekerjasama untuk menyelesaikan akar masalah ini," pungkasnya.

Dorong Produksi Pertanian, Aleg PKS Minta Petani Kecil **Dibantu Maksimal**

KUTIPAN

Jakarta (12/12) --- Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN asuransi yang dihadiri Direktur Utama PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Jasa Indonesia meminta agar Jasindo dapat memberi backup full kepada petani terutama petani kecil.

"Petani kecil ini rata-rata tidak punya kemampuan bankable. Untuk itu pemerintah mesti hadir melalui PSO nya terutama pada persoalan asuransi. Ini skema sudah bagus, pemerintah bantu 80% biaya asuransi, tapi mesti tepat sasaran jangan sampai petani besar yang mandiri lantas menerima bantuan pemerintah dari asuransi ini," tutur Nevi.

Nevi mengatakan, saat ini Asuransi Jasindo telah dipercaya untuk menjalankan penugasan dan program pemerintah seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK), Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) serta Jaminan Kesehatan Pejabat

Tinggi Negara.

"Kami sepakat di Komisi VI, agar PT Asuransi Jasa Indonesia dapat meningkatkan pelayanan Asuransi Gagal Panen untuk memberikan rasa aman kepada Petani Penerima Subsidi dan membuka peluang bisnis Asuransi Non Subsidi bagi Petani," ungkap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa efektivitas asuransi ini akan terasa pada para petani atau peternak kecil. Ia mencontohkan, Asuransi Usaha Tani Padi meliputi Perlindungan risiko gagal panen yang telah berjalan sejak 2015. Begitu juga Asuransi Usaha Ternak

Sapi yaitu perlindungan risiko atas kematian dan kehilangan sapi yang telah berjalan sejak 2016. Semua dengan Premi 80% oleh Pemerintah.

"Saya berharap, Asuransi tani dan ternak ini mampu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Petani menjadi semangat berproduksi karena ada jaminan yang memang komoditas pertanian dan peternakan sangat berisiko gagal panen. Untuk itu, PT Asuransi Jasa Indonesia mesti dapat memastikan keamanan investasi perusahaan dan anak perusahaan untuk menjaga kesehatan keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga backup full kepada petani dan peternak dapat dilakukan dengan mudah," tutup Nevi Zuairina.

**Hj. NEVI ZUAIRINA**Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Petani kecil ini rata-rata tidak punya kemampuan bankable. Untuk itu pemerintah mesti hadir melalui PSO nya terutama pada persoalan asuransi. Ini skema sudah bagus, pemerintah bantu 80% biaya asuransi, tapi mesti tepat sasaran jangan sampai petani besar yang mandiri lantas menerima bantuan pemerintah dari asuransi ini,"

Harga Minyak Dunia Jauh di Bawah Asumsi Dasar APBN,

PKS: HARGA BBM WAJIB TURUN!

- Harga minyak mentah internasional terus anjlok, berkisar di angka **USD 70-80** per barel.
- Pemerintah pernah berjanji jika harga minyak dunia turun di bawah **USD 75** per barel maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan.



Sumber : West Texas Intermediate (WTI)



Harga BBM bersubsidi yang berlaku di Indonesia saat ini berdasarkan asumsi ICP APBN Revisi tahun 2022 = **USD 100** per barel.



“

Sekarang saat yang tepat bagi Pemerintah menghitung ulang untuk segera menurunkan harga jual BBM bersubsidi.

Pemerintah jangan ingkar janji. Masyarakat kan tidak lupa akan janji ini.

Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

Harga Minyak Dunia Terus Turun

Rofik Desak **Segera** **Turunkan Harga Pertalite!**

KUTIPAN

Jakarta (17/12) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menuntut Pemerintah untuk menurunkan harga Pertalite imbas turunnya harga minyak dunia.

Dilansir dari Bloomberg, harga minyak dunia yang sebelumnya menyentuh angka 100 dollar AS per barel kini berada di angka 74,29 dollar AS (Data Bloomberg 17/12/2022).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadiji mengatakan, saat ini harga jual Pertalite yang sebesar Rp 10.000 per liter sejak dinaikkan pada 3 September 2022 lalu, memang sudah mulai mendekati harga keekonomiannya.

Walaupun begitu, belum ada wacana pemerintah menurunkan harga BBM RON 90 itu. Lantaran, harga jual Pertalite saat ini masih di bawah harga keekonomian. (Kompas)

Rofik mengatakan, seharusnya penurunan harga minyak dunia juga diikuti

dengan turunnya harga BBM bersubsidi juga. Terlebih, sudah ada beberapa negara maju seperti Inggris dan Amerika yang sudah menurunkan harga BBM-nya terlebih dahulu.

"Kan ngenes, masyarakat di dunia menikmati turunnya harga, sementara masyarakat kita yang ekonominya masih susah ini tidak ikut menikmatinya," ujar politisi PKS tersebut.

Rofik juga merespon alasan pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi dikarenakan Pertalite belum mencapai harga keekonomian.

Menurutnya, dana kompensasi dan subsidi pemerintah sebelumnya sudah dialokasikan dengan asumsi USD 100 per barel, sehingga sudah seharusnya ketika harga minyak dunia turun begitu pula dengan harga BBM subsidi.

"Jadi dana ini sudah menjadi hak masyarakat. Sehingga, kalau level harga minyak mentah sudah di bawah asumsi ya otomatis harus turun juga harga BBM-nya," tutur adeg dari Dapil Jateng VII tersebut.

Rofik pun sudah menekan diturunkannya harga BBM bersubsidi tersebut sejak Agustus lalu, dimana ketika itu harga minyak dunia juga sudah mengalami penurunan.

Rofik menekan pemerintah untuk konsisten dengan penggunaan dana kompensasi dan subsidi yang sudah dialokasikan tersebut, terlebih dana tersebut tertancup dalam APBN yang juga disepakati dengan DPR.

Rofik menilai, sikap pemerintah yang inkonsisten ini dapat memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap upaya pembangunan pemerintah lainnya.

"Apalagi saat ini sebagian publik menengarai banyaknya alokasi anggaran yang tidak tepat seperti anggaran negara untuk kereta cepat, pembangunan IKN, rencana pemberian insentif subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan lain-lain," imbuh Rofik.



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

“Seharusnya penurunan harga minyak dunia juga diikuti dengan turunnya harga BBM bersubsidi juga. Terlebih, sudah ada beberapa negara maju seperti Inggris dan Amerika yang sudah menurunkan harga BBM-nya terlebih dahulu. Kan ngenes, masyarakat di dunia menikmati turunnya harga, sementara masyarakat kita yang ekonominya masih susah ini tidak ikut menikmatinya

Aleg PKS: Pembahasan dan Pengesahan RUU EBT Berpeluang Cacat Hukum

KUTIPAN

Jakarta (16/12) --- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai pembahasan dan pengesahan RUU EBT berpotensi cacat hukum karena prosedur administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Perundang-undangan.

Mulyanto menyebut, sejak awal prosedur pembahasan RUU EBT ini bermasalah. Sebab surat presiden kepada DPR terkait pembahasan RUU EBT tidak disertakan dengan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Padahal menurut ketentuan Undang-Undang, presiden harus menjawab surat DPR terkait usulan pembahasan RUU paling lambat 60 hari sejak surat dikirimkan. Dalam waktu 2 bulan tersebut presiden harus mengirimkan surat presiden, lengkap dengan DIM terkait materi pembahasan.

"Tapi faktanya sampai 120 hari presiden belum mengirimkan DIM untuk dibahas. Dalam rapat kerja

Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah, Menteri ESDM menyampaikan DIM akan disampaikan menyusul. Kalau tanpa DIM terus apa yang mau dibahas?" ujar Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menyebut pemerintah tidak serius membahas RUU EBT ini. Padahal dalam konferensi G20 belum lama ini Pemerintah terkesan sungguh-sungguh menyiapkan peta jalan pemanfaatan energi bersih. Tapi ironisnya untuk membahas RUU EBT saja Pemerintah malah asal-asalan.

"Bagaimana bisa disebut serius menyiapkan aturan implementasi EBT kalau hingga saat ini DIM terkatung-katung. Secara formil bisa bermasalah

RUU ini. Bisa digugat ke MK kalau proses pembahasannya seperti ini," tegas Mulyanto.

Untuk mengatasi masalah tersebut Mulyanto mendesak Pemerintah segera menyiapkan DIM. Ia minta Pemerintah dapat menyelesaikan perbedaan pendapat di jajarannya agar DIM bisa segera diselesaikan. Sebab banyak hal yang perlu dibahas terkait RUU EBT ini.

"Saya mendengar di internal Pemerintah sendiri terjadi beda pendapat terkait beberapa poin pembahasan. Itu sebabnya DIM utk RUU EBT ini jadi lambat disiapkan," tandasnya.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Bagaimana bisa disebut serius menyiapkan aturan implementasi EBT kalau hingga saat ini DIM terkatung-katung. Secara formil bisa bermasalah RUU ini. Bisa digugat ke MK kalau proses pembahasannya seperti ini,

Teror pada Imam Masjid dan Bom Bunuh Diri Terulang Lagi, HNW Serukan Hukuman Keras bagi Pelaku

KUTIPAN

Jakarta (07/12) --- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengutuk keras berulangnya teror dan kekerasan terhadap Imam Masjid, yang mungkin terulang karena tidak ada tindak lanjut berupa sanksi hukum yang tegas dan keras terhadap mereka yang melakukan teror terhadap Imam Masjid.

Hidayat juga menyerukan agar Umat secara swadaya bersama aparat penegak hukum untuk menjaga keselamatan imam dan keamanan masjid, agar kasus-kasus teror dan kekerasan terhadap imam masjid bisa dihentikan dan tak terulang lagi.

Beberapa kasus terakhir adalah pemukulan terhadap imam Masjid Ar-Rahman di Pondok Gede, Bekasi pada 2 Desember 2022 dan penembakan yang mengakibatkan wafatnya Imam Masjid Al Hijrah di Manokwari, Papua Barat pada 23 November lalu.

"Kedua kasus teror yang

sayangnya sampai sekarang belum jelas apa sanksi maksimal kepada para pelaku teror terhadap kedua imam Masjid tersebut," ungkapnya.

HNW sapaan akrabnya sangat prihatin dengan kembali terulangnya teror kekerasan terhadap imam Masjid yang juga tokoh Agama ini, tetapi ia juga mengingatkan agar peristiwa teror terhadap Imam Masjid tersebut tidak membuat umat takut datang ke masjid untuk sholat maupun memakmurkannya.

"Penting umat tidak menjadi takut datang ke masjid

karena adanya teror-teror tersebut, sebab kalau sampai Umat takut ke Masjid, maka teroris-teroris terhadap Imam Masjid itu akan tepuk tangan merasa terornya berhasil. Karenanya agar Umat segera merapatkan barisan bersama jemaah Masjid maupun aparat keamanan, untuk menjaga dan menyelamatkan masjid dan para imam/muadzin," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (02/12).

Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya fungsinya mengurus urusan keagamaan ini mengatakan penjagaan oleh umat tentunya tetap dalam koridor bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang.

"Ini merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian menjaga ketertiban dan keamanan dan memberantas terorisme terhadap Masjid dan Imam Masjid," tuturnya.

Menurut HNW, peran serta masyarakat ini dapat dilakukan sambil menunggu agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Agar polisi mengusut tuntas teror-teror tersebut sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan yang bisa hadirkan kondisi kondusif, apalagi di tahun 2023, bangsa Indonesia termasuk Umat Islam di dalamnya, sudah memasuki politik menyongsong pesta demokrasi, pemilihan umum serentak, 2024

Tokoh dan Simbol Agama (RUU PTS) yang sudah disepakati masuk dalam kategori Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, agar segera dilakukan pembahasan dan pengundangannya oleh DPR dan Pemerintah.

"Peristiwa terulangnya

teror terhadap Imam Masjid yang menjadi bagian dari simbol/tokoh Agama Islam itu, menunjukkan semakin perlunya RUU tersebut untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan Pemerintah," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Gaji Dokter Internship Dinaikkan Setelah Viral, Politisi PKS: Pemerintah Harus Mau Dengar

KUTIPAN

Jakarta (17/12) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar Kementerian Kesehatan melakukan berbagai pertimbangan sebelum merumuskan kebijakan jika terkait dengan stakeholder lain.

Dalam kasus terbaru, Menteri Kesehatan merevisi aturan gaji dokter internship setelah ramai di media sosial. Sebelumnya, sebuah akun memprotes pemberian gaji dokter internship sebesar Rp 1,1 juta meski di tempatkan di daerah-daerah. Setelah ramai, Menkes baru merevisi aturan tersebut dan melakukan penyesuaian gaji dokter internship.

Kurniasih mengatakan, kebijakan yang terkait dengan pihak lain ada baiknya Kementerian Kesehatan bisa meminta masukan misalnya dalam hal ini dari organisasi profesi sebelum mengeluarkan kebijakan.

"Ini jadi pelajaran bahwa setiap kebijakan tentu harus

ditimbang dengan matang sejak sebelum diberlakukan. Salah satu pertimbangan matang ini mengajak dan meminta masukan dari berbagai stakeholder yang mungkin terkait dengan kebijakan ini. Semoga jadi pelajaran ke depan," papar Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (17/12/2022).

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini menambahkan, Kemenkes lebih mendorong dan memperhatikan teman-teman dokter internship. Sebab bukan hanya sekali ini saja kasus yang cukup membingungkan bagi dokter internship.

Pada Juli 2022, Kemenkes sempat mengeluarkan surat edaran pemberitahuan sementara anggaran bantuan

hidup dokter internship. Sontak kebijakan ini kemudian juga ramai diperbincangkan dan diprotes sebagai dokter internship melalui media sosial.

Setelah ramai, sehari kemudian Kemenkes mengeluarkan surat edaran yang membatalkan surat edaran sebelumnya dengan menyebut Bantuan Biaya Hidup tetap akan dibayarkan.

"Kita sudah memahami jika rasio dokter kita itu sangat kurang, di samping itu persoalan pemerataan dokter juga masih jadi catatan besar. Dokter internship ini bagian dari solusi dua persoalan di atas. Jika hak dokter internship ini masih sering diganggu kita berharap apa untuk perbaikan pemenuhan akses kesehatan masyarakat lewat dokter?" kata dia.

Kurniasih menegaskan, dokter internship seharusnya menerima insentif yang layak terlebih lagi mereka yang ditempatkan di daerah tertinggal dan terluar dengan fasilitas kesehatan kita yang masih belum merata.

"Bisa dimaknai teman-



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Kita sudah memahami jika rasio dokter kita itu sangat kurang, di samping itu persoalan pemerataan dokter juga masih jadi catatan besar. Dokter internship ini bagian dari solusi dua persoalan di atas. Jika hak dokter internship ini masih sering diganggu kita berharap apa untuk perbaikan pemenuhan akses kesehatan masyarakat lewat dokter?"

teman internship ini sejak berjuang dan berkorban dengan segala keterbatasan. Jadi dengan revisi gaji yang terbaru kita harapkan dokter internship bisa terus mendapat perhatian

yang layak agar bisa bekerja dengan baik meningkatkan kualitas kesehatan kita," sebut Kurniasih.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Badai PHK di Startup, Wakil Ketua FPKS: Kemnaker RI Harus Pastikan Dipenuhinya Hak Pekerja

KUTIPAN

Selain soal hak pekerja dari perusahaan, Netty juga meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan segera mencairkan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Jakarta (14/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani angkat suara terkait maraknya PHK di dunia startup. Tercatat, hingga awal Desember 2022, sudah ada 24 Startup di Indonesia yang melakukan PHK.

Menurut Netty, pemerintah melalui Kemnaker RI harus terus memantau proses PHK tersebut.

"Pastikan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan startup. Pemerintah harus membuka layanan aduan untuk para pekerja yang merasa hak-haknya tidak tertunaikan," katanya dalam keterangan

media, Selasa, 13 Desember 2022.

Selain soal hak pekerja dari perusahaan, Netty juga meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan segera mencairkan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pemerintah sebaiknya memiliki skema agar para pekerja yang di PHK ini dapat diserap di berbagai sektor pekerjaan. Maksimalkan bursa kerja dan implementasi kartu prakerja," katanya.

"Tentunya mantan pekerja startup ini memiliki talenta digital yang dibutuhkan dalam industri era digital saat ini," tambah Netty.

Terakhir, Netty meminta Kemnaker RI agar membuka ruang komunikasi dengan para startup-startup di tanah air.

"Segala upaya untuk mencegah PHK harus terus dilakukan agar jangan sampai badai PHK ini berlanjut. PHK demi PHK yang terjadi akan berdampak kepada ekonomi nasional yang tengah bergeliat bangkit sejak pandemi Covid-19," tambahnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemerintah melalui Kemnaker RI harus terus memantau proses PHK tersebut. Pastikan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan startup. Pemerintah harus membuka layanan aduan untuk para pekerja yang merasa hak-haknya tidak tertunaikan





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Selamat & Sukses

Atas pelantikan

**LAKSAMANA TNI
YUDO MARGONO**

Sebagai Panglima TNI



Soal RUU PPSK, Aleg PKS **Singgung** Keamanan Perbankan dan Data Nasabah

KUTIPAN

Jakarta (08/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan perlunya sistem yang jelas untuk keamanan data perbankan. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat Komisi XI pada Selasa (08/12).

Dalam kesempatan tersebut, Anis menjelaskan beberapa poin pendapat akhir mini Fraksi PKS dalam pembahasan RUU PPSK yang berlangsung dalam rapat Komisi XI, salah satunya menyinggung permasalahan keamanan perbankan yang sedang marak belakangan ini.

"RUU ini dalam beberapa poin sangat bermanfaat, namun sayangnya kami Fraksi PKS memiliki beberapa catatan yakni tentang keamanan data perbankan," tuturnya

"Di tengah peningkatan teknologi ini kerentanan kerahasiaan data nasabah semakin meningkat. Kami menekankan pentingnya kerahasiaan data perbankan ini utamanya para nasabah,"

tambah Anis.

Anis menyebutkan bahwa pembukaan informasi nasabah perbankan kepada penyelenggara ITSK perlu diatur dalam sistem yang jelas.

"Fraksi PKS memandang bahwa pembukaan informasi nasabah perbankan kepada penyelenggara ITSK perlu diatur melalui sistem yang jelas.

Pembukaan informasi nasabah dari perbankan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Bank kepada penyelenggara ITSK. Pembukaan informasi nasabah tetap berada di bawah otoritas terkait," jelasnya.

Anggota DPR RI Komisi X ini juga menjelaskan bahwa RUU PPSK belum membahas secara detail dari Konglomerasi

Keuangan.

"Fraksi PKS berpendapat Konglomerasi Keuangan dalam hasil pembahasan RUU ini belum didefinisikan dengan jelas, termasuk penetapan kriteria, ruang lingkup, aspek materialitas dan pemberlakuan threshold berdasarkan kriteria tertentu dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan," ungkapnya.

"Konglomerasi dalam RUU ini juga harus dikaitkan dengan praktik persaingan usaha yang sehat sehingga dapat mencegah praktek monopoli dan oligopoli dalam jasa keuangan," tegas Anis.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

"Fraksi PKS memandang bahwa pembukaan informasi nasabah perbankan kepada penyelenggara ITSK perlu diatur melalui sistem yang jelas. Pembukaan informasi nasabah dari perbankan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Bank kepada penyelenggara ITSK. Pembukaan informasi nasabah tetap berada di bawah otoritas terkait,"

RUU PPSK Disahkan

Aleg PKS: Perlu Peningkatan Literasi pada Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (16/12) --- Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly menegaskan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Junaidi menyatakan bahwa RUU PPSK merupakan termasuk omnibus law sektor keuangan, yang di dalamnya ada beberapa lembaga terkait sektor keuangan BI OJK lembaga penyimpanan sehingga di dalam ada persoalan tentang penataan penataan dr sisi kelembagaan dan mekanisme.

"RUU P2SK ini akan dilakukan penguatan-penguatan mandat lembaga-lembaga di sektor keuangan sehingga dapat lebih optimal," ujar Junaidi.

Menurutnya, pengesahan RUU yang dilangsungkan pada penutupan sidang rapat paripurna akan memberikan

penegasan sikap bahwasanya masing-masing lembaga dapat melaksanakan mandat tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan lebih baik, lebih kuat, dan lebih efektif.

"Setelah RUU ini disahkan, maka saya akan banyak memberikan peningkatan literasi kepada masyarakat, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat relatif rendah berdasarkan survei di tahun 2022 ini masih sekitar 49% belum separuhnya yang mengerti keuangan", pungkasnya



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

RUU PPSK merupakan termasuk omnibus law sektor keuangan, yang di dalamnya ada beberapa lembaga terkait sektor keuangan BI OJK lembaga penyimpanan sehingga di dalam ada persoalan tentang penataan penataan dr sisi kelembagaan dan mekanisme. RUU P2SK ini akan dilakukan penguatan-penguatan mandat lembaga-lembaga di sektor keuangan sehingga dapat lebih optimal,

Jelang Pelantikan Panglima TNI

Aleg PKS Apresiasi Adanya Tradisi Rotasi Matra

KUTIPAN

Jakarta (13/12) --- Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX, Nurhasan Zaidi menanggapi terkait pelantikan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI.

Hal ini disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI yang ke-12 di Gedung Nusantara II pada Selasa (13/12).

Dalam pernyataannya, Nurhasan mengapresiasi langkah Komisi I DPR RI yang pada Rapat Paripurna melaporkan hasil uji fit and proper atau uji kelayakan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI.

Anggota Komisi VII ini juga mengapresiasi adanya tradisi baru bahwa panglima TNI tidak hanya dari angkatan darat.

"Secara umum saya mengapresiasi sebuah tradisi baru bahwa panglima ini tidak harus dari angkatan darat, biasanya dari jaman orde baru 'kan dari angkatan darat,' sampai ini."

Nurhasan kemudian menyampaikan bahwa pelantikan Laksamana Yudo

sebagai panglima TNI ini merupakan hasil dari kapasitas yang dimilikinya dan berdasarkan objektivitas.

"Jadi pada dasarnya baik dari angkatan darat, laut, udara itu bisa semua. Sekarang 'kan Laksamana Yudo dari angkatan laut, pasti orang-orang ini merupakan orang hebat, ini persoalan kapasitas dan objektivitas, dari laporan uji kelayakan ini Insya Allah saya mengapresiasi," ujarnya.

Oleh karena itu, Nurhasan berharap Laksamana Yudo dapat melaksanakan tugasnya sebagai panglima TNI.

"Mudah-mudahan Laksamana Yudo bisa melaksanakan tugas yang berat, bagaimana mengayomi dan hadir di masyarakat Indonesia dan Insya Allah angkatan TNI kita selalu menjadi kebanggaan," pungkasnya.



H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

"Jadi pada dasarnya baik dari angkatan darat, laut, udara itu bisa semua. Sekarang 'kan Laksamana Yudo dari angkatan laut, pasti orang-orang ini merupakan orang hebat, ini persoalan kapasitas dan objektivitas, dari laporan uji kelayakan ini Insya Allah saya mengapresiasi,"

RUU Ekstradisi Disahkan

Aleg PKS: Kita sangat menantikan kinerja RUU ini!

KUTIPAN

Jakarta (15/12) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menantikan kinerja RUU Ekstradisi antara Singapura dan Indonesia.

Adang menyampaikan bahwa RUU ini adalah awal yang menjanjikan untuk memburu para buronan terutama para koruptor.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara PKS Legislative Report Kamis, (15/12).

Adang mengatakan bahwa RUU Ekstradisi akan memberikan kemudahan kepada pemerintah baik itu Indonesia maupun Singapura untuk memburu para buronan.

“Hari ini akan ditetapkan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang pencarian buronan. Hal ini berarti para pelaku korupsi dan kejahatan lainnya lebih mudah untuk dilakukan proses penegakan hukum bersama dengan pemerintah Singapura,” ujarnya.

Menurutnya, pengesahan RUU tersebut akan memberikan

kemudahan bahwasanya pemerintah siap untuk mengejar para buronan, terkhusus koruptor yang sering bersembunyi di Singapura.

“Setelah RUU ini nanti kita sahkan, kita tahu bahwa banyak para pelaku koruptor yang lari ke Singapura dan kita berharap kita tidak akan kesulitan untuk menangkap,” tuturnya.

Ia berharap bahwa perjanjian ini akan memberikan dampak yang maksimal dalam penegakan hukum.

“Kita berharap dengan ditetapkannya perjanjian ini tentang Ekstradisi Buron ini, kita dapat menangkap buron lebih banyak. Karena terus terang saja kita masih kurang target-target di Singapura tau di negara lain yang perlu juga mendapatkan perhatian,” pungkasnya.

**Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Komisi III DPR RI

“Hari ini akan ditetapkan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang pencarian buronan. Hal ini berarti para pelaku korupsi dan kejahatan lainnya lebih mudah untuk dilakukan proses penegakan hukum bersama dengan pemerintah Singapura

Live
Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



BERSAMA ARI PUTRA UTAMA



Saksikan
Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB

Fraksi PKS: Limitasi 18 Tahun RUU Ekstradisi Buronan Singapura-Indonesia Bisa Batasi Efektivitasnya

KUTIPAN

Jakarta (06/12) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Dimiyati Natakusumah menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, (06/12).

Dimiyati mengungkapkan bahwa perancangan RUU ini sangat penting, dan tidak ada alasan untuk menolak pengesahannya.

"RUU ini sangat penting karena berbagai persoalan berupa kejahatan lintas negara, antara lain narkoba, terorisme, perdagangan dan penyelundupan manusia serta pelarian aset-aset hasil korupsi menjadi hal yang perlu diselesaikan baik oleh Indonesia maupun Singapura," ungkapnya.

Selain menjelaskan urgensinya, ia juga menjelaskan beberapa catatan penting sikap

PKS yang menurutnya masih kurang dalam RUU tersebut yakni tentang limitasi 18 tahun yang menurutnya kurang memaksimalkan diplomasi hukum.

"Saat ini, kita dihadapkan pada RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan, meskipun PKS sepakat namun kami harus menjelaskan bahwa upaya diplomasi hukum ini belum maksimal dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya terkait berlakunya

perjanjian ekstradisi hanya dapat menjangkau tindak pidana yang terjadi 18 (delapan belas) tahun sejak perjanjian disepakati (2004)," terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

Aleg PKS Dapil Banten I ini memaparkan bahwa dengan memberikan limitasi 18 tahun setelah perjanjian disepakati, maka hal itu tidak akan menjangkau buronan yang telah divonis namun tidak bisa diekstradisi karena tindak pidananya terjadi sebelum 2004.

"FPKS memahami rasionalitas masa berlaku surut tersebut selaras dengan ketentuan kadaluwarsa penuntutan, namun pemberian limitasi tersebut tentunya membatasi efektivitas pemberlakuan perjanjian ini," ujarnya.

"Hal ini tidak akan maksimal, karena membatasi waktu khususnya terhadap buronan yang telah divonis dengan putusan berkekuatan hukum tetap namun tidak bisa diekstradisi karena tindak pidana tersebut terjadi sebelum tahun 2004," tambahnya.



**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI

"Saat ini, kita dihadapkan pada RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan, meskipun PKS sepakat namun kami harus menjelaskan bahwa upaya diplomasi hukum ini belum maksimal dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya terkait berlakunya perjanjian ekstradisi hanya dapat menjangkau tindak pidana yang terjadi 18 (delapan belas) tahun sejak perjanjian disepakati (2004)

Legislator PKS: Petani **Harus Ditinggikan** Kedudukannya dan Dihargai

KUTIPAN

Padang (06/12) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto menyebutkan petani harus ditinggikan kedudukannya dan dihargai. Petani sudah berjasa menyediakan pangan untuk seluruh anak bangsa.

"Produk taninya sampai ke istana. Setiap harinya dihidangkan dengan tempat terbaik," ujar Hermanto dihadapan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Tanaman Perkebunan dalam Rangka Kemudahan Akses Pemasaran Kopi Rakyat di Hotel Green Hill, Alahan Panjang, Kabupaten Solok belum lama ini.

"Mestinya demikian juga dengan petani yang menghasilkan produk tani tersebut, kedudukannya ditinggikan dan dihargai," tambah legislator dari FPKS DPR RI ini.

Yang terjadi saat ini, lanjut Hermanto, petani sering

kehilangan momentum nilai tambah.

"Disaat tanam tidak ada pupuk. Disaat panen harga turun. Sering Kehilangan momentum," paparnya.

Kondisi pertanian demikian, katanya, seolah diciptakan tidak punya ekspektasi masa depan.

"Kalau kondisi demikian terus berlanjut, dikhawatirkan kita akan kehilangan petani milenial," ucap Hermanto.

Bimtek untuk petani, menurutnya, merupakan salah satu upaya untuk meninggikan kedudukan petani.

"Dengan bimtek ini diharapkan petani mengetahui informasi di hulu dan di hilir.

Kalau tahu informasi maka bisa buat strategi," tutur Hermanto.

"Sebagai petani kopi jangnan puas sekedar menghasilkan buah kopi. Harus tahu caranya bagaimana agar bisa menghasilkan nilai tambah," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Selain Hermanto, hadir sebagai narasumber Romauli Siagian (Koordinator Serat dan Atsiri Kementerian Pertanian), Rezky Hidayat (Kepala Bidang Perkebunan, Tanaman Semusim dan Rempah Provinsi Sumatera Barat), Deni Mahesarani (Pembina Sekolah Tani Ternak Nelayan Provinsi Sumatera Barat). Hadir juga tokoh muda setempat Roi Yurnades.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

“Produk taninya sampai ke istana. Setiap harinya dihidangkan dengan tempat terbaik, Mestinya demikian juga dengan petani yang menghasilkan produk tani tersebut, kedudukannya ditinggikan dan dihargai,”



Perhatian pada UMKM di Dapil, Diah Nurwitasari Berikan Pelatihan dan Pendampingan Usaha

KUTIPAN

Kabupaten Bandung (16/12) --- Sebanyak 40 UMKM di Kabupaten Bandung mendapat manfaat dari program Make Over Gerobak dan Warung dari CSR PT. PLN.

Peresmian program ini dilakukan di salah satu warung penerima manfaat di Desa Mandalamekar Kecamatan Cimenyang oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari.

Sebelum meresmikan dan menyerahkan secara simbolik bantuan ini, dalam sambutannya Diah Nurwitasari menghaturkan terima kasih.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai anggota Komisi VII DPR-RI yang bermitra salah satunya dengan PT. PLN, mengucapkan terima kasih kepada PLN yang memiliki program CSR yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi UMKM." ucap Aleg Perempun lulusan Jerman ini.

Dengan program ini, lanjut Diah, pemilik UMKM bukan hanya dipercontok warung atau gerobaknya tapi juga diberikan

pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.

"Sekali lagi saya mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih," Diah menambahkan.

Diah berharap program ini berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

"Selamat kepada pelaku UMKM yang menerima manfaat dari program ini, semoga program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan juga saya berharap semoga di tahun mendatang program ini dapat terus bergulir sebagai bentuk kerjasama Komisi VII DPR-RI dan PT.PLN." Diah menutup sambutannya dengan penuh harapan.

Adapun Ismail Haris,

pejabat TJSL CSR PT.PLN unit induk distribusi Jabar yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan kesiapan untuk terus bekerjasama.

"PT.PLN yang mempunyai program CSR ini tentu tidak bisa menjalankan program ini tanpa ada persetujuan anggaran dari Komisi VII DPR-RI, oleh karena itu saya mewakili PT. PLN menghaturkan terima kasih kepada DPR-RI khususnya Ibu Diah Nurwitasari sebagai Anggota Komisi VII. Insya Allah kami akan selalu siap bekerjasama dengan Komisi VII untuk mengulirkan program yang baik ini." Ungkap perwakilan PT. PLN itu.

Peresmian program CSR PLN ini juga dihadiri pejabat pemerintahan setempat, unsur Muspika dan tokoh masyarakat.

"Kami haturkan terima kasih kepada Bu Diah Nurwitasari anggota DPR-RI dari PKS yang telah membantu masyarakat kami dalam mengembangkan usahanya." Ucap Hadian Febrianto salah satu tokoh masyarakat yang hadir pada acara itu.



Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Selamat kepada pelaku UMKM yang menerima manfaat dari program ini, semoga program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan juga saya berharap semoga di tahun mendatang program ini dapat terus bergulir sebagai bentuk kerjasama Komisi VII DPR-RI dan PT.PLN

Nevi Zuairina **Dikukuhkan** sebagai Ketua FPTI Sumbar Periode 2022-2026

KUTIPAN

Padang (08/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina dilantik secara resmi dan dikukuhkan sebagai ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sumatera Barat periode 2022-2026.

Pada pengukuhan ini, Nevi langsung menyambut dengan pidato agenda kerja selama kepemimpinan FPTI tingkat provinsi Sumbar.

"Saya menemukan kecintaan yang besar dan sungguh-sungguh untuk FPTI Sumbar. Alhamdulillah, hari ini saya bersama Pengurus Provinsi FPTI Provinsi Sumbar telah dikukuhkan. Target kepemimpinan saat ini adalah memajukan olahraga Panjat Tebing di Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih baik kedepannya. Sejauh ini, perkembangan atlet FPTI menunjukkan tren meningkat, panjat tebing semakin digandrungi oleh banyak pihak," tutur Nevi dalam sambutan Pidatonya.

Legislator fraksi PKS ini

menyampaikan, bahwa ia mempunyai cita-cita dan program kerja akan membangun Wall Panjat Tebing yang baru di daerah Sumatera Barat, sebagai wujud dan bentuk kecintaannya tersebut. Ia mengutarakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu mencetak atlet-atlet panjat tebing yang berprestasi yang dimulai pada kategori kelompok usia dini hingga kategori senior dan bisa meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional, nantinya.

"Saya memiliki keyakinan, bahwa komunikasi, koordinasi, interaksi dan kekompakan dalam tim panjat tebing menjadi kunci dalam menjabarkan program latihan mulai dari klub-klub dan pengcab FPTI se Sumbar. Para

atlet panjat tebing secara rutin harus selalu menjalani latihan pada klub & pengcab FPTI dengan sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Kami juga berupaya menjangkau atlet muda yang berbakat," paparnya.

Nevi mengharapkan, bahwa prestasi demi prestasi dapat ditorehkan para atlet panjat tebing dari Sumatera Barat, berbagai usia. Sebagai Bundo Kandung dari Sumbar yang saat ini sedang menjabat sebagai Anggota DPR, banyak harapan dari berbagai pihak kepemimpinannya memberikan kemajuan bagi atlet panjat tebing serta meraih prestasi terbaik pada ajang panjat tebing di tingkat nasional maupun Internasional dan kejuaraan dunia.

"Legalitas kepemimpinan baru Pengprov FPTI Sumbar telah terbentuk dan telah dikukuhkan dan disumpah jabatan. Saya ucapkan terimakasih dan mohon dukungan dari semua pihak agar saya sebagai Ketua Umum yang baru beserta semua pengurus yang hadir pada saat ini, dapat menorehkan prestasi sesuai harapan," pungkas Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Saya memiliki keyakinan, bahwa komunikasi, koordinasi, interaksi dan kekompakan dalam tim panjat tebing menjadi kunci dalam menjabarkan program latihan mulai dari klub-klub dan pengcab FPTI se Sumbar. Para atlet panjat tebing secara rutin harus selalu menjalani latihan pada klub & pengcab FPTI dengan sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Kami juga berupaya menjangkau atlet muda yang berbakat

Andi Akmal Beri Bantuan Motor Roda Tiga Kepada Puluhan Kelompok Tani di Kabupaten Bone

KUTIPAN

Kabupaten Bone (11/12) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi, Andi Akmal Pasluddin, memberikan bantuan kepada puluhan kelompok tani di Bone berupa motor roda tiga.

Kendaraan ini sangat efektif untuk pengangkutan dari tempat produksi pertanian atau area tanam ke tempat lain mulai dari bahan-bahan untuk pengolahan tanah, pupuk, bibit atau benih hingga pengangkutan hasil panen.

Bantuan ini hanya selang beberapa minggu, motor roda 3 yang disalurkan Andi Akmal Pasluddin untuk Desa dan Kelurahan dapat sampai kepada penerima.

"Ini bentuk hasil aspirasi masyarakat yang kami upayakan untuk petani di Bone agar petani di Bone lebih berdaya dan sejahtera. Jadi kita ingin betul betul petani kita meningkat dan petani kita semakin mudah berproduksi termasuk harganya semakin baik," ujar Andi Akmal.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menerangkan, bahwa sepeda motor roda 3 merupakan kendaraan multiguna. Satu kelompok tani dapat satu, sehingga sebanyak 10 unit diperuntukkan 10 kelompok tani. Pemberian motor roda tiga ini memiliki tujuan untuk mempermudah hasil pertanian sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat petani.

"Kita juga ada bantu jalan tani agar motor roda 3 ini lewat jalan tani" Ujar Politisi kelahiran Bone ini.

Akmal berharap, agar bantuan ini sesuai pengajuan mereka para kelompok tani.

"Keinginan saya pribadi, kalau bisa 27 kecamatan di kasih semua tidak ada

pegecualian. Siapapun bisa bermohon dan jika memenuhi syarat kita beri" Jelasnya.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini, sebelumnya juga sudah membantu 5 unit motor yang sama kepada desa dan kelurahan sebagai kendaraan operasional. Diantara bantuan itu, yakni kelurahan tanah Batue kecamatan libureng, Desa Matiro Walie kecamatan bengo, kelurahan pappolo Kec. Tanete Riattang , Kelurahan Lonrae dan desa Boareng kec kajuara.

"Saya berpesan, kepada para penerima bantuan agar merawat dan menjaga dengan baik semua bantuan ini supaya berguna untuk semuanya demi kepentingan bersama. Tanggung jawab kita semua untuk mengoptimalkan sebaik mungkin bantuan ini agar tujuan kita bersama meningkatkan produksi pertanian dapat tercapai di Bone pada khususnya, dan di Sulawesi Selatan pada umumnya," tutup Andi Akmal Pasluddin.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Saya berpesan, kepada para penerima bantuan agar merawat dan menjaga dengan baik semua bantuan ini supaya berguna untuk semuanya demi kepentingan bersama. Tanggung jawab kita semua untuk mengoptimalkan sebaik mungkin bantuan ini agar tujuan kita bersama meningkatkan produksi pertanian dapat tercapai di Bone pada khususnya, dan di Sulawesi Selatan pada umumnya"



Kurniasih Ajak Kaum Ibu di Jaksel **Jadi Agen** Pencegahan Stunting

KUTIPAN

Jakarta (06/12) --- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menggelar Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama mitra kerja di wilayah DKI Jakarta bersama Anggota Komisi IX DPR RI Dr Kurniasih Mufidayati.

Hadir dalam agenda yang digelar di Masjid Al Hikmah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini Anggota Komisi IX DPR RI Dr Kurniasih Mufidayati, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN RI Edi Setiawan, Kabid Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Ibnu Saleh dan Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Selatan, Fathur Rohim, Sabtu (3/12/2022).

Kurniasih dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang peran penting kaum ibu dalam upaya pencegahan stunting.

Ia menyebut, meski di kota besar prevalensi stunting di DKI masih 14 persen. Target

pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri bisa menurunkan angka di menjadi 0 persen.

Meski berada di bawah angka nasional yang 27 persen, namun stunting wajib dikurangi demi masa depan generasi mendatang.

“Disinilah peran penting kaum ibu, sebab yang menjadi garda terdepan dalam memastikan anak stunting sejak diketahui kehamilan adalah kaum ibu dengan dukungan penuh sang ayah,” kata Kurniasih.

Kurniasih juga menyitir, bangkitnya sebuah bangsa tergantung dari kaum ibunya, begitu juga jatuhnya sebuah generasi juga tergantung dari ibunya.

“Stunting ini pada masa kelahiran akan langsung terlihat bagaimana pertumbuhan anak terganggu, pada masa mendatang tumbuh kembang anak baik fisik, kecerdasan dan mental spiritual juga akan terhambat, ini yang akan melemahkan generasi kita mendatang,” ujar Kurniasih.

Sebab itu kaum ibu harus punya sensitivitas terhadap ancaman stunting sejak mulai dari kehamilan hingga 1.000 hari kehidupan pertama.

“Kasih sayang ibu itu natural dan kuat, kita para ibu bisa melakukan apapun agar buah hati kita sehat dan normal. Maka jauhan penyebab stunting sejak dini. Yuk ibu-ibu sama-sama kita berjuang,” sebut Kurniasih.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

“Stunting ini pada masa kelahiran akan langsung terlihat bagaimana pertumbuhan anak terganggu, pada masa mendatang tumbuh kembang anak baik fisik, kecerdasan dan mental spiritual juga akan terhambat, ini yang akan melemahkan generasi kita mendatang.”

Kembangkan UMKM Kuliner Purbalingga, Rofik Gelar Kontes Food Taste

KUTIPAN

Purbalingga (22/12) — Anggota DPR RI Rofik Hananto mengadakan Kontes Food Taste di kediamannya di Purbalingga, Rabu (21/12/2022). Kontes ini merupakan lomba kuliner produk UMKM yang diikuti oleh 156 UMKM di Purbalingga.

Dalam pembukaannya, Rofik menyampaikan tujuan utama diadakannya kontes food taste, salah satunya untuk mengetahui lebih dalam potensi kuliner di Purbalingga. Menurut anggota Komisi VII DPR RI tersebut, kuliner dipercaya bisa membranding sebuah daerah. "Kontes ini digelar untuk mempromosikan produk-produk kuliner dari para peserta agar dikenal luas oleh masyarakat. Potensi kuliner Purbalingga sangat bagus. Ini layak untuk diperjuangkan dan dikembangkan," ujarnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut mengatakan salah satu kebutuhan dasar pelaku UMKM adalah bagaimana produknya dapat dikenal masyarakat. Bisa lewat wisata, industri serta event. Kontes ini memiliki

peluang agar produk mereka dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

"Kami memiliki kesempatan untuk mengenalkan produk mereka agar lebih dikenal oleh masyarakat baik di wilayah Dapil Jawa Tengah 7 maupun di Indonesia," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Rofik juga menyampaikan konsep 'Food Street' yang bisa dibangun di salah satu jalan di Purbalingga. Ketua BPJE (Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader) DPP PKS tersebut mengusulkan kepada Pemkab untuk menjadikan jalan Alun-alun ke timur sebagai lokasi gelaran Festival Food Street karena lokasinya yang strategis dan potensial.

Melalui kontes ini, Rofik berharap peserta kontes pelaku UMKM dapat memperluas jaringan serta mempromosikan produknya ke masyarakat luas.

"Saya berharap, peserta dapat memanfaatkan kegiatan hari ini untuk memperluas jaringan pemasaran. Menurut saya, produk yang ditampilkan hanya ada enak dan enak sekali."

"Bisa jadi ini menjadi tahapan agar bisnis ini bisa berkembang lagi...jangan lupa di meja produk ditulisin nama produk, pemilik dan nomor telepon agar mudah dihubungi jika ada yang memesan," imbuhnya.

Fidhoh Threeyati istri dari Rofik Hananto turut hadir sebagai juri pada acara tersebut, dimana ia sudah memberikan perhatian lama terhadap UMKM Purbalingga. Pada sambutannya, ia mengatakan UMKM terpilih akan berkesempatan untuk mengisi stand makanan acara tasyakuran pernikahan anaknya nanti.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Saya berharap, peserta dapat memanfaatkan kegiatan hari ini untuk memperluas jaringan pemasaran. Menurut saya, produk yang ditampilkan hanya ada enak dan enak sekali"



Salurkan Bantuan di Dapil, Bukhori **Salurkan** Kursi Roda Hingga Alat Bantu Jalan

KUTIPAN

Semarang (22/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyerahkan belasan paket bantuan ATENSI yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, dan alat bantu jalan. Bantuan diserahkan kepada penerima manfaat di sela acara pengawasan penyaluran BLT BBM di Kabupaten Semarang, Kamis (01/12).

Bukhori mengatakan, bantuan ATENSI ini merupakan program aspirasi hasil advokasinya dengan Kementerian Sosial. Dia pun memuji kinerja Balai Kartini Kementerian Sosial yang telah memberikan respons memadai atas advokasi yang pihaknya ajukan.

“Warga kami mengapresiasi kolaborasi DPR dan Kementerian Sosial karena dampaknya terbukti bisa dirasakan secara positif oleh warga kami. Warga kami dan juga DPR berharap kerjasama yang baik ini bisa diteruskan secara berkelanjutan,” jelas Bukhori

Anggota DPR dari Fraksi

PKS ini berharap bantuan disabilitas yang diberikan dapat mendukung aktivitas dari penerima manfaat yang selama ini terbatas. Menurutnya, adalah para penyandang disabilitas ini bukan berarti orang yang tidak mampu, tetapi hanya membutuhkan alat penunjang agar bisa beraktivitas seperti orang normal lainnya.

“Sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, adalah kewajiban negara untuk menyediakan apa yang dibutuhkan bagi warga negaranya yang membutuhkan khusus untuk memperoleh kesempatan. Negara hadir untuk

menyediakan berbagai peluang, sarana penunjang, serta dukungan lainnya bagi mereka sehingga bisa terwujud kesetaraan,” katanya.

Sementara ditemui terpisah, Ridwan Yudianto, mahasiswa berkebutuhan khusus penerima manfaat program advokasi Bukhori mengaku bersyukur bisa memperoleh bantuan kursi roda.

“Alhamdulillah sangat bahagia. Sebagai difabel, saya merasa sangat terbantu dengan adanya kursi roda ini karena bisa memudahkan saya untuk melakukan mobilitas dan kegiatan belajar di kampus. Saya berdoa agar Pak Bukhori diberikan rezeki yang melimpah dan bisa kembali terpilih di DPR. Aamiin,” ujar mahasiswa Ilmu dan Tafsir Alquran UIN Salatiga ini.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

“Warga kami mengapresiasi kolaborasi DPR dan Kementerian Sosial karena dampaknya terbukti bisa dirasakan secara positif oleh warga kami. Warga kami dan juga DPR berharap kerjasama yang baik ini bisa diteruskan secara berkelanjutan,”



Syahrul Aidi Bantu Pulangkan Warga Riau Korban Human Trafficking dari Jakarta

KUTIPAN

Jakarta (21/12) — Enam bulan yang lalu, persisnya pada bulan Juli 2022, salah seorang warga Riau yaitu dari Kabupaten Kampar yang bernama Mita Rahmawati alias Mita (17 tahun) hilang dari rumah.

Namun Mita saat ini telah sampai ke rumah orang tua dalam keadaan sehat namun butuh dukungan medis.

Kepulangan Mita ini berkat pertolongan dari Anggota DPR RI Dapil Riau 2, DR. H. Syahrul Aidi MAAZAT Lc MA yang mendapatkan informasi dari salah seorang pengurus DPP PKS. Syahrul Aidi saat dihubungi pada Selasa (20/12/2022) membenarkan bahwa MR dia fasilitasi kepulangannya ke rumah orang tua setelah mendapatkan informasi dari salah satu kolega partainya di DPP PKS.

"Alhamdulillah adinda MR sudah bersama keluarga saat ini. Kemarin salah satu sahabat kita di DPP PKS menelepon bahwa di wilayah tempat tinggalnya ada salah seorang

perempuan korban human trafficking yang mengadu ingin pulang. Karena kolega ini tau Adinda MR dari Riau langsung mengontak saya agar segera dibawa pulang. Alhamdulillah hari ini yang bersangkutan telah ada di rumah," terang Syahrul Aidi kepada wartawan.

Dia menjelaskan, MR diintai saat di jalan tidak jauh dari rumahnya di Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kampar, tiba-tiba punggungnya ditepuk dari belakang dan setelah itu dia tidak mengetahui apapun. Setelah itu dia berada dalam kekuasaan dan pengawasan komplotan tersebut hingga beberapa bulan.

"Setelah beberapa bulan dalam masa pengekapan dan dipaksa bekerja yang tidak baik,

dia mencari berbagai agar lari. Setelah berhasil kabur dari komplotan dan merasa aman, dia dibantu kawannya mencari pertolongan agar bisa pulang. Disitulah bertemu dengan kita." terang Syahrul Aidi.

Syahrul Aidi juga mengingatkan kepada para orang tua agar menjaga anak gadis dan anak dibawah umur dari tindakan komplotan human trafficking. Komplotan saat ini mengincar korban yang lengah dari perhatian keluarga.

Salah seorang keluarga korban, Eka saat dihubungi terpisah, menyatakan ucapan terima kasihnya kepada Syahrul Aidi yang telah memfasilitasi kepulangan anaknya hingga ke rumah. Saat ini keluarganya sudah ditemui juga oleh Babinsa dan Kapolsek Tambang.

"Terima kasih kami ucapkan kepada pak Syahrul Aidi yg telah membantu menemukan anak kami Mita. Semoga pak Syahrul Aidi diberi kesehatan dan kemudahan dari Allah SWT." tutupnya.



**Dr. H. SYAHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

“Setelah beberapa bulan dalam masa pengekapan dan dipaksa bekerja yang tidak baik, dia mencari berbagai agar lari. Setelah berhasil kabur dari komplotan dan merasa aman, dia dibantu kawannya mencari pertolongan agar bisa pulang. Disitulah bertemu dengan kita”





**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Terima Kunjungan Forsitma dan RKI Kramat Jati, Aleg PKS Ajak **Kobarkan Semangat** Untuk Indonesia Lebih Baik!

KUTIPAN

Jakarta (14/12) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menerima kunjungan dari 350 orang anggota Forsitma dan RKI Kramat Jati dengan agenda silaturahmi dan kunjungan DPR RI yang berlangsung pada Rabu (14/11) di Ruang Rapat MPR RI Gedung Nusantara V.

Dalam kunjungan ini, Anis berterima kasih dan sangat mengapresiasi kehadiran Forsitma dan RKI Kramat Jati. Tak hanya itu, Anis juga sangat senang melihat antusiasme kehadiran Forsitma dan RKI Kramat Jati.

"Terima kasih sudah memenuhi undangan serta hadir dalam agenda hari ini. Ini spesial banget kunjungan hari ini, hanya dikhususkan Forsitma Kramat Jati. Biasanya kan satu Jakarta Timur, sedangkan hari ini khusus untuk menyambut Forsitma Kramat Jati",

sambutnya.

Anis juga menyampaikan, dengan adanya kunjungan ini, masyarakat dapat lebih mengetahui tugas pokok sebagai Anggota DPR RI.

"Saya sebagai orang Kramat Jati juga, saya berharap dengan ber kunjungannya Ibu-Ibu kesini, bisa lebih dekat dan mengenal dengan DPR RI serta tahu tugas-tugasnya. Tidak hanya itu, ibu-ibu dapat mengetahui bagaimana perjuangan PKS. Kami dari PKS selalu meniatkan apapun amal dan tugas kita di DPR RI ini

adalah bagian dari ibadah. Dapil saya, warga Jakarta Timur, disini saya mewakili warga, oleh karena itu saya wajib menjalankan amanah ini dengan penuh integritas", ujar Anis.

Anggota DPR RI Komisi XI ini juga memohon doa dari Forsitma dan RKI Kramat Jati, agar PKS selalu amanah dan terus memperjuangkan masyarakat dalam mengemban tugas.

"Mudah-mudahan kunjungan ke rumah rakyat ini, menjadi rangkaian ibadah dari kita. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Forsitma dan RKI Kramat Jati. Ayo semangat untuk Indonesia yang lebih baik!", pungkas Anis.

Silaturahmi tersebut disertai dengan dialog interaktif serta perbincangan antara Anis, Forsitma dan RKI Kramat Jati, serta Humas DPR RI.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Mudah-mudahan kunjungan ke rumah rakyat ini, menjadi rangkaian ibadah dari kita. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Forsitma dan RKI Kramat Jati. Ayo semangat untuk Indonesia yang lebih baik!",



Terima Kunjungan SMPIT
Alam Golden School

Aleg PKS Ajak **Semangat** untuk Indonesia!

KUTIPAN

Jakarta (13/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, menyambut kunjungan dari SMPIT Alam Golden School, Kota Solok Sumatera Barat dengan agenda studi tour dan pembelajaran peran fungsi DPR RI di Ruang Meeting pada Selasa (13/12).

Aspirasi ini membahas tentang bagaimana cara kerja lembaga DPR dan pentingnya Leadership dalam pemerintahan.

Hermanto mengatakan bahwa DPR mempunyai peran besar dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Indonesia.

"Materi Leadership yang terpenting bagi kami adalah Decision Maker, karena DPR sangat mempengaruhi peraturan pemerintahan di Indonesia salah satunya adalah membuat Undang-Undang," ucapnya

Berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945),

Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi yaitu, Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

"Salah satu fungsi penting Anggota DPR disini ya membuat Undang-undang," ucapnya

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini juga menekankan pentingnya kita untuk mempunyai Skill Leadership dalam dunia pekerjaan, skill kepemimpinan juga sangat berpengaruh besar dalam kinerja DPR.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

“Jikalau kita mau belajar dan punya Skill Kepemimpinan, kita bisa belajar dari lingkungan sekitar kita seperti ikut organisasi sekolah osis, pramuka, dan eskul yang ada di sekolah”



Terima Mahasiswa Kampus Merdeka, Aleg PKS: Pentingnya Kesadaran Masyarakat untuk Kesejahteraan Negara

KUTIPAN

Jakarta (15/12) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, menerima kunjungan aspirasi dari sejumlah mahasiswa program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI pada Kamis (15/12/22).

Dalam kegiatan ini membahas mengenai pentingnya kesadaran masyarakat untuk mendorong kesejahteraan Indonesia.

Netty mengatakan bahwa untuk mendorong kesejahteraan negara ini tidak bisa hanya dengan mengandalkan pemerintah, namun juga harus disertai dengan kesadaran masyarakatnya.

"Kesejahteraan negara kita dapat didorong dengan meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Jadi tidak bisa

kita hanya berharap pada pemerintah. Namun, membangun kesadaran masyarakat ini harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran diri sendiri dulu," katanya.

Selain itu, ia juga berpesan kepada anak-anak di Indonesia untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mau untuk menerima masukan untuk mendorong kesejahteraan Indonesia.

"Saya berharap anak-anak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, yaitu menjadi orang

yang kritis dan moderat, kemudian juga harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal," ujarnya.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Netty, Anggota Komisi IX dari dapil Kalimantan Barat I, Alifudin menyampaikan pentingnya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tidak mudah terpengaruh hal-hal buruk.

"Kita harus menyesuaikan bahasa, menyesuaikan perilaku, kepada dan dengan siapa kita bergaul, tidak bisa kita bergaul dengan pemabuk lalu kita ikutan jadi pemabuk," katanya.

"Saya selalu mencontoh Rasul, beliau bisa masuk ke segala kalangan mulai dari anak kecil hingga kalangan rajaraja," tambahnya.

Oleh karena itu, Netty dan Alifudin berpesan agar semua masyarakat dapat memiliki kemampuan komunikasi interpersonal sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"Kesejahteraan negara kita dapat didorong dengan meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Jadi tidak bisa kita hanya berharap pada pemerintah. Namun, membangun kesadaran masyarakat ini harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran diri sendiri dulu,"



Terima Rombongan Kades dari Sumbawa, Johan Rosihan: **Siap Kolaborasi!**

KUTIPAN

Jakarta (12/12) --- Anggota komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan, menyambut kunjungan 30 orang kepala desa (kades) se-Kabupaten Sumbawa, beberapa diantaranya yaitu kades Empang Bawa, kades Ongko, kades Dete, kades Batu Tering, kades Lantung, kades Labuan Bontong, kades Simu, kades Tede, dan yang lainnya.

Pada kunjungan silaturahmi ini para kepala desa didampingi oleh Rachman Ansori, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Sumbawa pada (12/12) di kantor DPR RI tepatnya diruang Fraksi PKS.

Kedatangan kepala desa yang ditemani oleh kepala dinas DPMPD dimaksud sebagai ajang silaturahmi serta memperkuat solidaritas untuk menyatukan tujuan membangun desa dan daerah. Dalam pertemuan tersebut bertujuan pula untuk meningkatkan sinergi dalam hal pembangunan desa dan daerah.

"Kunjungan kami pada kesempatan ini untuk bersilaturahmi serta menguatkan sinergitas dalam membangun desa, tentu saja membawa aspirasi dari masyarakat serta mewakili mereka ditingkat pusat." ujar Kepala Dinas DPMPD pada pengantarnya.

Pembangun desa yang diharapkan kedepannya memiliki orientasi pada kepentingan rakyat dan juga kemaslahatan rakyat agar tercipta kesejahteraan desa yang hukumnya wajib terjadi.

"Pembangunan desa juga diharapkan dapat dilakukan

pada desa-desa yang memiliki keteringgalan, diharapkan dengan solidaritas dan sinergi bersama kepala desa dan masyarakat bisa menjadikan desa yang berkembang serta mandiri," ungkapnya.

Diharapkan pula, imbuhnya, percepatan pendapatan dan jalur ekonomi pada masyarakat yang ada di desa-desa tersebut bisa melaju dengan konsisten membaik.

Dalam pertemuan ini, Johan Rosihan memberikan dukungan sepenuhnya pada setiap kepala desa dalam mewujudkan percepatan perbaikan dalam berbagai bidang pada setiap desa.

Mulai dari pembaharuan kinerja di setiap instansi desa, menciptakan peluang bagi rakyat untuk mengembangkan usaha dalam segala bidang serta semua usaha desa dalam membangun infrastruktur bagi masyarakat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

"Saya sangat berharap kepala desa bisa fokus dalam bekerja yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, memberikan usaha paling baik untuk membangun desa. Dan saya juga selalu menerima apapun masukan serta aspirasi dari seluruh daerah. Bukan hanya saya saja, Fraksi PKS DPR RI khususnya selalu terbuka menampung dan menerima masukan dari setiap desa,"

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakj Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

Rakernas Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Aleg PKS Dukung Perempuan Berpolitik dan Masuk Parlemen

KUTIPAN

Jakarta (13/12) --- Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada Rakernas Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPi) menyampaikan bahwa partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penuh kiprah perempuan di dunia politik hingga masuk parlemen.

Bukti nyata PKS mengedepankan perempuan masuk dunia politik dapat terlihat pada setiap line up penyusunan Calon Anggota Dewan, PKS selalu melebihi kuota perempuan 30%.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menyampaikan, bahwa di partainya, ada Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga dimana bidang ini ada satu program yang berfokus pada peningkatan kapasitas Anggota Perempuan.

Menurutnya, program ini sangat efektif untuk menyiapkan SDM perempuan unggul untuk memenuhi kuota 30 %.

"Partai kami ada beberapa

dapil mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten Kota, terdapat caleg perempuan di nomor urut 1 pada susunan calon anggota dewan yang ditetapkan KPU. Caleg perempuan di PKS sangat potensial untuk mendulang suara sehingga mampu terpilih karena mendapat suara terbesar," ungkap Nevi.

Politisi PKS ini menunjukkan, bahwa di salah satu daerah di Indonesia, yakni di Tangerang Selatan, Aleg Perempuan PKS pada periode lalu 80 % dari aleg pks yang terpilih. Sedangkan periode saat ini berimbang 50% antara perempuan dan laki-laki aleg

pks di kota itu.

Nevi mengungkapkan, bahwa partainya selalu ada pendidikan politik untuk perempuan PKS dimana salah satu pokok materinya adalah memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Pola pikir yang akan dibentuk adalah untuk membentuk Bangsa Indonesia yang terbangun dari keluarga-keluarga yang kokoh. Sehingga, Perempuan PKS mampu untuk berkolaborasi mewujudkan Keluarga Indonesia Berkualitas.

"Keterwakilan Perempuan di parlemen memang penting. Akan tapi, jangan sampai aktivitas perempuan di dunia politik, melupakan perannya sebagai ibu dan istri di keluarga. Abai dalam tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu, bisa berdampak fatal pada ketahanan nasional kita," tegas Nevi.

Nevi menguraikan, dahulu, yang menghambat kita adalah karena keterbatasan informasi. Untuk saat ini, siapa saja dan dimana saja mampu mendapatkan informasi. Ditambah akses pendidikan



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Keterwakilan Perempuan di parlemen memang penting. Akan tapi, jangan sampai aktivitas perempuan di dunia politik, melupakan perannya sebagai ibu dan istri di keluarga. Abai dalam tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu, bisa berdampak fatal pada ketahanan nasional kita"

yang semakin mendapat dukungan dari pemerintah dan semua pihak.

"Perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Dan saya menghimbau kepada setiap wanita, agar mau berubah dan

bersungguh-sungguh menjalani proses perubahan tersebut menjadi pribadi yang lebih baik, dan bermanfaat bagi keluarga, bangsa, negara, dan agama," tutup Nevi Zuairina.

selamat Hari Ibu



22 Desember 2022



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Abstrakif Substantif

Dengan Ketahanan
Ekonomi Keluarga, Ibu
Bahagia, Indonesia
Sejahtera.



**Hj. Ledia Hanifa A,
S.Si., M.Psi.T**

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Pesan Menyentuh di Hari Ibu bagi Andi Akmal Pasluddin

KUTIPAN

Kab. Bone (22/12) --- Setiap 22 Desember bagi Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin merupakan hari istimewa oleh sebab diperingati sebagai Hari Ibu sebagai Sosok penting dalam kehidupan.

Menurutnya, Peran ibu sangat besar untuk membentuk karakter anak dan keluarga.

Menyadari pentingnya peran seorang Ibu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulse II, Andi Akmal Pasluddin (AAP), terus menyerukan kepada konstituennya untuk selalu menghargai setiap wanita yang ada di sekitar kita.

“Ibu menjadi sosok yang sangat berjasa bagi kehidupan anak dan juga di dalam keluarga. Bukan sekadar mengandung dan melahirkan anak, tetapi doa seorang ibu itu sangat berarti. Kehadirannya dan kasih sayangnya, akan membentuk karakter anak yang tangguh penuh moral dan

tanggung jawab,” jelas Andi Akmal.

Politisi PKS ini menambahkan, kesuksesan yang diraih oleh seseorang tidak lepas dari doa seorang ibu. Momentum hari ibu ini menjadi pengingat secara terus menerus, akan strategis dan berjasanya seorang ibu bagi setiap manusia.

Maka dari itu, momentum Hari Ibu, dimaknai Andi Akmal Pasluddin, tidak semata seremonial belaka. Melainkan ada pesan penting yang harus dipahami bersama.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

“Ibu menjadi sosok yang sangat berjasa bagi kehidupan anak dan juga di dalam keluarga. Bukan sekadar mengandung dan melahirkan anak, tetapi doa seorang ibu itu sangat berarti. Kehadirannya dan kasih sayangnya, akan membentuk karakter anak yang tangguh penuh moral dan tanggung jawab,”

Peringatan Hari Ibu, Aleg PKS: **Momentum Bangkit** Pasca Pandemi dan Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga

KUTIPAN

Kabupaten Bandung (22/12) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, yakni Diah Nurwitasari menyampaikan selamat memperingati Hari Ibu untuk segenap kaum ibu di seluruh pelosok Indonesia.

Politisi wanita dari Dapil Jawa Barat II itu menyatakan, peringatan Hari Ibu tahun 2022 yang diperingati setiap 22 Desember merupakan momentum dalam mengenang setiap perjuangan kaum wanita terutama para kaum ibu dan juga momentum untuk bangkit pasca pandemi.

"Menghadapi penghujung tahun, ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk kembali bangkit pasca pandemi yg menimpa negeri yg kita cintai ini," ujar Diah Nurwitasari.

Wanita yang akrab di sapa dengan 'Teh Diah' ini juga mengajak semua Ibu beserta seluruh para keluarga Indonesia

untuk meningkatkan kebersamaan.

"Saya mengajak Ibu-ibu semua beserta para keluarga Indonesia untuk kembali kita meningkatkan kebersamaan kita," seru Diah.

Tidak hanya itu, politisi wanita yang merupakan lulusan Jerman ini mengungkapkan, peringatan Hari Ibu tidak sebatas pada bagaimana menghargai ibu saja. Menurut ia, peringatan ini bisa untuk dimensi yang lebih luas yakni salah satunya yang dicanangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk meningkatkan ketahanan

ekonomi keluarga, karena apabila ketahanan ekonomi keluarga meningkat maka para Ibu akan bahagia dan Indonesia sejahtera.

"PKS mengajak semuanya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, dengan ketahanan ekonomi keluarga, Ibu bahagia Indonesia sejahtera," ucap Wakil Ketua BPKK DPP PKS itu.

Perlu diketahui, peringatan Hari Ibu Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden Nomor 316 tahun 1959. Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959 menetapkan tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional.



Dipl.Ing. Hj. **DIAH**
NURWITASARI, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Peringatan Hari Ibu tidak sebatas pada bagaimana menghargai ibu saja. peringatan ini bisa untuk dimensi yang lebih luas yakni salah satunya yang dicanangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, karena apabila ketahanan ekonomi keluarga meningkat maka para Ibu akan bahagia dan Indonesia sejahtera

Peringati Hari Ibu, HNW: Pemerintah **Harus** **Anugerahkan Gelar** **Pahlawan Nasional** untuk **Ibu-ibu Bangsa**

KUTIPAN

Jakarta (22/12) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember 2022,

mengusulkan agar Pemerintah diakhir masa jabatan Presiden Jokowi, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bagi Ibu-Ibu Bangsa yang telah berjuang dan berjasa besar dalam mempersiapkan dan meraih kemerdekaan Indonesia.

Hidayat menerangkan peringatan Hari Ibu Tahun 2022 yang mengangkat tema 'Perempuan Berdaya, Indonesia Maju' adalah momentum tepat untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi sejumlah Ibu-Ibu Bangsa yang telah berjasa memberdayakan perempuan, memajukan dan mempersiapkan Indonesia Merdeka, di antaranya adalah Maria Ulifah Santoso, Rr. Soekaptinah, dan Rahmah El

Yunusiah.

"Saya mengusulkan agar Presiden Joko Widodo meninggalkan legacy positif di penghujung masa jabatannya, dengan menetapkan gelar Pahlawan Nasional bagi ketiga Ibu Bangsa tersebut. Mereka telah terbukti berjasa untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, berpengaruh besar dalam dunia Pendidikan dan persiapan kemerdekaan Indonesia, namun sampai sekarang belum kunjung diakui sebagai Pahlawan Nasional oleh Negara," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/12).

Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengapresiasi Presiden

Jokowi yang di tahun 2022 telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 5 tokoh.

Namun, kelima tokoh tersebut semuanya adalah Bapak-Bapak Bangsa, yakni Ahmad Sanusi, Paku Alam VIII, dr. Rubini, Salahuddin bin Talabuddin, dan dr. Soeharto Sastrosoeyoso.

NW berharap Presiden juga menunjukkan keberpihakan kepada Ibu-Ibu Bangsa, terutama di tengah momentum peringatan Hari Ibu Nasional.

"Di antara Ibu-Ibu Bangsa, ada yang jadi anggota BPUPK seperti Maria Ulifah Santoso dan Rr. Soekaptinah, atau berjuang juga dengan pendidikan seperti Rahmah El Yunusiah. Mereka sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, melengkapi penghargaan yang juga telah diberikan kepada Bapak-Bapak Bangsa di tahun 2022 ini," sambungnya.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menjelaskan, Maria Ulifah merupakan perempuan



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Sudah sewajarnya Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bagi mereka, para Ibu Bangsa, agar semakin menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi milenial Perempuan Indonesia untuk berdaya dan berperan-serta dalam rangka memajukan Indonesia,"

Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum pada masa kolonial. Beliau merupakan salah satu anggota BPUPK yang kemudian pasca kemerdekaan aktif mengisi berbagai jabatan

strategis Pemerintahan seperti menjadi Menteri Sosial dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Ibu Membangun Karakter Bangsa

OLEH

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Setiap tanggal 22 Desember kita memperingati hari ibu. Peringatan ini kita pahami sebagai bentuk pengakuan sekaligus penghormatan terhadap peran dan arti penting ibu dalam membangun bangsa.

Meskipun tentu saja peringatan ini tidak boleh hanya sekadar seremonial dan simbolisasi semata, tapi harus menjadi momentum untuk lebih membuka ruang bagi optimalisasi peran ibu sebagai pendidik utama (dan pertama) dalam sekolah pertama yang bernama keluarga.

Ibu merupakan jantung kehidupan karena setiap orang lahir dari rahim seorang ibu. Secara hakiki rahim seorang ibu memberikan pelajaran yang luar biasa bagi seorang anak.

Rahimnya tidak saja memberikan nutrisi yang menumbuhkan janin tapi menghadirkan ikatan (bonding) cinta dan kasih sayang pada diri anak. Ketika seorang anak lahir di dunia, cinta dan kasih sayang itulah yang membesarkannya. Cara ibu menyusui dan menyapih adalah pelajaran tentang menumbuhkan masa depan.

Sementara cara ibu menggendong dan menatahnyanya berjalan adalah pelajaran tentang memeluk dan mewujudkan harapan.

Dalam ajaran agama

posisi dan kedudukan seorang ibu tak terbantahkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadits Nabi bahwa keridhoan Allah terletak pada keridhoan orang tua, dan ibu adalah orang tua yang utama karena dalam hadits yang lain disebutkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pun, Rasulullah SAW memuliakan seorang ibu tiga kali lebih besar dari seorang ayah.

Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim disebutkan Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan berkata, Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi shalallaahu alaihi wasallam menjawab, Ibuimu! Dan orang tersebut kembali bertanya, Kemudian siapa lagi? Nabi shalallaahu alaihi wasallam menjawab, Ibuimu! Orang tersebut bertanya kembali, Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Ibuimu. Orang tersebut bertanya kembali, Kemudian siapa lagi, Nabi shalallahu alaihi wasallam menjawab, Kemudian ayahmu.

Ibu Membangun Karakter Bangsa (2)

Ibu dan Visi Kebangsaan

Melihat kedudukan strategis seorang ibu tersebut, sudah seharusnya upaya pemuliaan, penghormatan serta pengakuan terhadap peran-peran ibu dalam mendidik generasi diadfirmasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara.

Negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi optimalisasi peran tersebut serta bagi pemuliaan dan penghormatan ibu sebagai jantung kehidupan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang dibangun di atas pondasi nilai dan karakter kemanusiaan yang hakiki dan

nilai-karakter itu ditransformasikan sejak dini melalui peran-peran pengasuhan seorang ibu dalam sekolah keluarga. Bukan saja membangun bangsa, seorang ibu sejatinya juga mencetak pemimpin bangsa yang unggul melalui pendidikan kepribadian yang ditanamkan sejak dini.

Ahli psikologi menyatakan bahwa seorang manusia melewati masa-masa perkembangan kemampuan dan internalisasi nilai-karakter sepanjang hidupnya. Dan usia emas (the golden age) manusia itu ada pada masa anak-anak (khususnya fase usia 0-4 tahun)

karena kecerdasannya terbangun 50% dari total kecerdasan yang akan dicapai pada usia 18 tahun.

Jadi by scientific masa tersebut sangat menentukan tumbuh kembangnya sebagai generasi yang akan mengisi masa depan bangsa ini. Dan fase tersebut ada dalam peran pengasuhan seorang ibu (bersama ayah tentu saja).

Jika kita menyadari bukti ilmiah (scientific evidence) tersebut, dikaitkan dengan upaya membangun kebangsaan yang berkarakter, maka sudah semestinya kita memfokuskan energi dan kebijakan negara pada upaya optimalisasi peran ibu (orang tua) sebagai pendidik generasi.

Artinya, harus ada keberpihakan negara untuk melindungi dan mempromosikan peran ibu dan keluarga, dan itu dituangkan dalam kebijakan yang kongkrit dan bersifat masif menjadi sebuah gerakan kolektif.

Realitas hari ini bangsa kita menghadapi tantangan (sekaligus ancaman) nilai-karakter yang pada gilirannya akan mengoyak identitas kita sebagai sebuah bangsa. Masifnya budaya liberal telah menggeser sendi-sendi kehidupan sosial bahkan negara.

Masyarakat menjadi



Realitas hari ini bangsa kita menghadapi tantangan (sekaligus ancaman) nilai-karakter yang pada gilirannya akan mengoyak identitas kita sebagai sebuah bangsa. Masifnya budaya liberal telah menggeser sendi-sendi kehidupan sosial bahkan negara.

permissif, abai pada nilai-nilai luhur, yang berekses luas pada maraknya pergaulan bebas, kelahiran di luar nikah, aborsi, pornografi dan pornoaksi, narkoba, dan berbagai penyakit sosial lainnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemampuan keluarga untuk mentransformasi nilai-nilai luhur dan karakter kebangsaan nyatanya kalah

cepat dengan masifitas budaya yang merusaknya. Hal ini harus menjadi peringatan keras bagi para pemimpin dan guru bangsa bahwa jika kita tidak mampu menghadirkan solusi yang efektif maka akan menjadi ancaman serius bagi visi kebangsaan kita ke depan. Dan solusi itu ada pada revitalisasi peran ibu dan keluarga.

KUTIPAN

Bangsa yang besar adalah bangsa yang dibangun di atas pondasi nilai dan karakter kemanusiaan yang hakiki dan nilai-karakter itu ditransformasikan sejak dini melalui peran-peran pengasuhan seorang ibu dalam sekolah keluarga. Bukan saja membangun bangsa, seorang ibu sejatinya juga mencetak pemimpin bangsa yang unggul melalui pendidikan kepribadian yang ditanamkan sejak dini.

Ibu Membangun Karakter Bangsa (tamat)



Sebaliknya orang tua diberikan ruang dan peran-peran yang optimal dalam mengetahui, mendampingi, serta mengupayakan peningkatan dan perkembangan pendidikan anak-anak mereka.

Tawaran Kebijakan

Bagaimana model kebijakan negara yang mempromosikan optimalisasi peran ibu/orang tua/keluarga dalam mewujudkan generasi yang berkarakter? Bagi penulis hal itu dapat dilakukan jika negara

fokus dan berpihak pada upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Secara elementer ketahanan keluarga menempatkan ibu (orang tua) sebagai pendidik dan pengasuh utama bagi anak-anaknya.

Konsep ini akan memanggil setiap ibu Indonesia untuk kembali dan mengambil peran tanggung jawab penuh atas pengasuhan anak-anak mereka. Artinya para ibu dan orang tua harus mengikuti, mendampingi, mengupayakan, dan tidak bisa abai pada perkembangan anak-anak mereka.

Konsepsi tersebut secara tegas merupakan upaya mengarus-utamakan keluarga (family mainstreaming) dalam kehidupan, yang secara implementatif membutuhkan transformasi kebijakan negara terhadap dunia pendidikan secara luas. Tanggung jawab pendidikan anak tidak bisa lagi dilepas begitu saja pada institusi pendidikan formal tanpa melibatkan orang tua.

Sebaliknya orang tua diberikan ruang dan peran-peran yang optimal dalam mengetahui, mendampingi, serta mengupayakan peningkatan dan perkembangan pendidikan anak-anak mereka.

Konsepsi ini juga membutuhkan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya peran-peran orang tua, khususnya ibu, secara optimal. Antara lain diwujudkan dengan pemberian hak cuti hamil dan menyusui bagi ibu bekerja yang

memadai untuk memberikan hak-hak anak di masa-masa golden age mereka. Perusahaan atau kantor ibu bekerja juga harus terus didorong untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar ikatan (bonding) antara ibu dan anak-anak mereka tetap terjaga, antara lain dengan mengupayakan tempat pengasuhan anak (day care) di lingkungan perusahaan/kantor mereka.

Terakhir, secara luas negara harus terus hadir mengkampanyekan family mainstreaming ini dengan mensosialisasikan dan

memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada para ibu (dan calon ibu) tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Argumentasinya sederhana: Negara harus menjamin terwujudnya generasi bangsa yang berkarakter, dan itu lahir dari ibu yang memahami dan melaksanakan peran sebagai pendidik dan pengasuh utama generasi.

Semoga keberpihakan negara ini ke depan akan menjadi kado indah bagi ibu Indonesia.

Selamat hari ibu!

KUTIPAN

Secara elementer ketahanan keluarga menempatkan ibu (orang tua) sebagai pendidik dan pengasuh utama bagi anak-anaknya. Konsep ini akan memanggil setiap ibu Indonesia untuk kembali dan mengambil peran tanggung jawab penuh atas pengasuhan anak-anak mereka. Artinya para ibu dan orang tua harus mengikuti, mendampingi, mengupayakan, dan tidak bisa abai pada perkembangan anak-anak mereka.

Kualitas Hidup Ibu, Kunci Penurunan Stunting di Indonesia

image istimewa



OLEH

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKS / Ketua BPKK DPP PKS

Pandemi covid-19 yang mulai mereda, membuat Pemerintah kembali memberikan fokus perhatian pada beberapa isu strategis lain di sektor kesehatan. Salah satu isu yang menjadi fokus perhatian pemerintah adalah upaya menurunkan stunting yang mengalami perlambatan akibat pandemi covid-19.

Bahkan dalam peringatan Hari Anak Nasional lalu, pemerintah mengangkat tema 'Ayo Cegah Stunting agar Keluarga Bebas Stunting' dan Presiden secara khusus menyatakan bahwa stunting merupakan ancaman serius bagi masa depan Indonesia.

Indonesia juga hingga saat ini masih memiliki pekerjaan rumah besar karena prevalensi stunting yang masih sebesar 24,4%, sementara target di 2024 adalah 14%.

Namun ditengah ambisi besar penurunan stunting, kita dihadapkan pada fakta kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi makanan bergizi masih rendah.

Tim jurnalisme data harian Kompas yang mencoba menghitung biaya untuk membeli makanan bergizi di Indonesia berdasarkan standar komposisi Healthy Diet Basket (HDB), dan juga digunakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), menemukan

bahwa 183,7 juta atau 68 persen penduduk tidak mampu memenuhi kecukupan gizi tersebut.

Menggunakan standar tersebut, maka untuk mendapatkan makanan bergizi seimbang dibutuhkan biaya Rp. 22,126 per hari per orang atau Rp. 663,761 per bulan per orang, dimana nilai konsumsi makanan lebih dari separuh orang Indonesia masih dibawah nilai tersebut.

Hasil analisis Kompas tidak jauh berbeda dari analisis FAO tahun 2021 yang menunjukkan bahwa ada 69,1 persen penduduk Indonesia yang tidak mampu membeli pangan bergizi. Daerah-daerah di kawasan tengah dan timur Indonesia menjadi yang penduduknya paling banyak tidak memenuhi nilai kecukupan makanan gizi seimbang.

Prosentase jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang menjadi ironi

Kualitas Hidup Ibu, Kunci Penurunan ... (2)

dihadapkan pada upaya intervensi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi stunting. Dalam target intervensi sensitif yang dilakukan pemerintah, hanya 15,6 juta keluarga miskin dan rentang yang akan menerima bantuan sosial pangan. Artinya tidak semua penduduk yang berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang yang akan menerima bantuan sosial

pangan.

Sementara kondisi lapangan menunjukkan sekitar 23% anak lahir dengan kondisi sudah stunted, akibat ibu hamil sejak masa remaja kurang gizi dan anemia. Stunting juga meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan, akibat kurang protein hewani pada makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan

Stunting dan Kecukupan Makanan Bergizi

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang sering dialami oleh anak di dunia. Kejadian stunting menandai bahwa anak tersebut tidak cukup gizi. Ketidacukupan gizi merupakan salah satu faktor penyebab stunting yang juga dapat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga.

Meskipun penyebab terjadinya risiko stunting adalah multifaktorial, namun penyebab paling utama adalah kekurangan gizi kronis pada awal 1.000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat berupa kurangnya jumlah asupan makanan, atau kualitas makanan yang kurang baik, seperti kurangnya variasi makanan.

Kurangnya asupan gizi ini mulai dari calon ibu saat masih remaja, saat menikah dan hamil serta pada bayi dan balita yang diasuhnya yang berujung pada pertumbuhan yang mengalami hambatan.

Fakta temuan tim jurnalis Kompas ini tidak dapat dipungkiri merupakan ancaman bagi target untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia. Bagaimanapun kecukupan makanan bergizi seimbang merupakan syarat



Indonesia juga hingga saat ini masih memiliki pekerjaan rumah besar karena **prevalensi stunting yang masih sebesar 24,4%**, sementara target di 2024 adalah 14%.

penting untuk mengatasi stunting.

Menurut WHO sendiri, stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Namun

kondisi terjadinya stunting disebabkan oleh banyak faktor dan faktor tersebut tidak hanya terjadi pada anak.

Oleh karena itu intervensi dalam penanganan stunting juga bersifat multidimensi dan treatment yang diberikan juga tidak hanya anak sebagai

KUTIPAN

Prosentase jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang menjadi ironi dihadapkan pada upaya intervensi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi stunting. Dalam target intervensi sensitif yang dilakukan pemerintah, hanya 15,6 juta keluarga miskin dan rentang yang akan menerima bantuan sosial pangan. Artinya tidak semua penduduk yang berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang yang akan menerima bantuan sosial pangan.

Kualitas Hidup Ibu, Kunci Penurunan ... (3)



Bagi bayi usia 6-23 bulan intervensi dilakukan dengan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan pada balita selain dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, juga diberikan tambahan asupan gizi

sasarannya. Dalam intervensi spesifik untuk penurunan stunting misalnya, sasaran intervensi khususnya kelompok perempuan mulai dari gadis remaja, ibu hamil, anak usia 6-23 bulan sampai dengan balita

dengan berbagai intervensi sesuai dengan kelompok sasaran tersebut.

Pada gadis remajanya misalnya intervensi dilakukan dengan pemberian konsumsi tablet tambah darah selain

pendidikan keluarga dan kesehatan reproduksi. Pada ibu hamil intervensi spesifik dilakukan melalui pemberian tablet tambah darah selama 90 hari dan tambahan asupan gizi bagi yang mengalami kurang energi kronik (KEK).

Bagi bayi usia 6-23 bulan intervensi dilakukan dengan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan pada balita selain dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, juga diberikan tambahan asupan gizi.

Dalam konteks pemenuhan kecukupan gizi ini, WHO bahkan menetapkan empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pada 1000 hari pertama kelahiran. Keempat hal tersebut adalah ketepatan waktu, misalnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kesesuaian (adequate) jumlah makanan dalam pemberian MP-ASI dengan kebutuhan energi bayi. Selanjutnya juga keamanan jenis makanan yang diberikan dan memperhatikan kebersihan peralatan makan serta pemberian makanan secara reponsif artinya orang tua menentukan kapan, dimana, dan apa yang dimakan anak, anak menentukan berapa banyak yang dia makan.

Kualitas Hidup Ibu sebagai Prasyarat

Pengalihan leading institution dalam program percepatan penurunan stunting dari Kementerian Kesehatan ke BKKBN harus dimaknai sebagai pentingnya peran keluarga dalam penanganan stunting. Penanganan stunting tidak semata-mata dilakukan dengan pendekatan medis namun yang lebih penting adalah dengan pendekatan membangun keluarga yang sehat dan tangguh.

Maka disini peran ibu menjadi sangat penting dalam upaya penurunan stunting. Guru Besar Ilmu Gizi IPB Prof Dr. Hardiansyah mengatakan untuk bisa mencegah secara dini stunting maupun obesitas perlu

memahami bahwa kedua masalah tersebut harus segera dicegah.

Dalam hal ini ibu memiliki peran penting dalam menentukan makanan pada saat hamil dan pemberian gizi serta pola asuh pada anak setelah lahir.

Semua pihak harus memastikan bahwa Ibu harus memiliki kualitas hidup yang baik untuk mendukung upaya penurunan stunting. Kualitas hidup ibu untuk memastikan bahwa ibu memiliki kesehatan secara fisik, mental dan intelektual.

Hasil penelitian tentang stunting menunjukkan bahwa faktor lain yang turut berperan dalam risiko stunting antara lain kesehatan ibu selama kehamilan, pola asuh dan

KUTIPAN

Meskipun penyebab terjadinya risiko stunting adalah multifaktorial, namun penyebab paling utama adalah kekurangan gizi kronis pada awal 1.000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat berupa kurangnya jumlah asupan makanan, atau kualitas makanan yang kurang baik, seperti kurangnya variasi makanan.

Kualitas Hidup Ibu, Kunci Penurunan ... (Tamat)

kesehatan anak atau kekerapan mengalami penyakit infeksi, kondisi sosio-ekonomi serta lingkungan.

Bahkan sebuah penelitian terbaru mendapatkan bahwa tinggi badan ibu merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kejadian stunting.

Sehingga ibu yang sehat, saat hamil, setelah melahirkan, merawat bayi dan saat merawat balita akan berperan penting dalam mengurangi resiko stunting.

Ibu juga perlu didukung untuk sehat mental agar dalam kondisi psikologis yang baik

saat hamil maupun dalam merawat bayi dan balita. Sehingga ibu bisa memenuhi upaya-upaya untuk mencegah bayi stunting.

Para ahli sepakat bahwa Keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting, karena masalah gizi, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga. Dan ibu menjadi kunci karena ibu dalam rumah tangga memiliki peran lebih banyak dalam mengupayakan kesehatan keluarga Ibu adalah penyuluh keluarga sehat.

Ibu juga perlu didukung untuk cerdas dan memiliki pengetahuan yang cukup. Ini diperlukan agar ibu bisa menggali informasi dan memiliki pengetahuan tentang stunting, risikonya serta bagaimana mengantisipasinya.

Karena ibu harus mengerti bagaimana menjaga kesehatan anak kemudian menjaga diri sendiri dan menjaga kesehatan keluarga Ibu yang cerdas juga akan lebih kreatif dalam menyediakan makanan bergizi, mengelola keuangan untuk memenuhi asupan gizi bagu dirinya maupun keluarganya khususnya bayi dan balita tanpa perlu biaya mahal.

Ibu perlu dukungan

KUTIPAN

Semua pihak harus memastikan bahwa Ibu harus memiliki kualitas hidup yang baik untuk mendukung upaya penurunan stunting. Kualitas hidup ibu untuk memastikan bahwa ibu memiliki kesehatan secara fisik, mental dan intelektual.

keuangan yang cukup, tidak harus besar agar bisa memberikan asupan makanan bergizi bagi dirinya maupun bayi/balitanya. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu, apalagi yang menyebabkan lingkungan yang tidak sehat seperti rokok. Namun ironi justru kebutuhan untuk konsumsi makanan bergizi seimbang ini seringkali kalah oleh konsumsi rokok.

Betapa pentingnya kualitas hidup ibu dalam penurunan stunting ini ini diantaranya ditunjukkan dengan hasil penelitian di Sukoharjo yang menemukan terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas hidup ibu dengan Perkembangan Motorik Kasar Balita. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hayashida et al (2006), mengenai kualitas hidup pada ibu yang merawat

bayi menyimpulkan bahwa untuk mencapai nilai terbaik dalam kondisi psikologi, fungsi, dan kontrol atau tumbuh kembang anak, diperlukan kualitas hidup ibu yang baik pula.

Ada ungkapan bahwa 'hanya ibu yang tidak boleh sakit' sebagai ekspresi betapa seorang ibu memegang peranan yang sangat penting dalam keluarga. Bagaikan seorang manajer, ibu mengatur dan mengurus banyak hal, bekerja 24 jam tanpa digaji, tanpa cuti, dan waktu istirahat yang sedikit sekali.

Maka dalam konteks upaya menurunkan prevalensi stunting ini juga harus diikuti dengan upaya meningkatkan kualitas hidup ibu dengan memenuhi kebutuhannya agar sehat secara fisik, mental dan intelektual. Selamat Hari Ibu...



Ibu perlu dukungan keuangan yang cukup, tidak harus besar agar bisa memberikan asupan makanan bergizi bagi dirinya maupun bayi/balitanya. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu, apalagi yang menyebabkan lingkungan yang tidak sehat seperti rokok. Namun ironi justru kebutuhan untuk konsumsi makanan bergizi seimbang ini seringkali kalah oleh konsumsi rokok.



*Turut
Berduka
Cita*



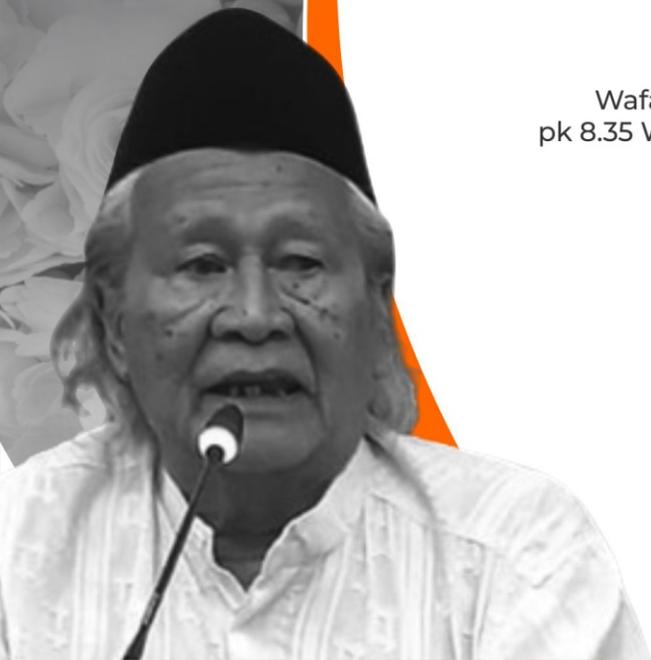
Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Drs. H. Ridwan Saidi

Budayawan Betawi, sejarawan,
dan intelektual Islam

Wafat pada Minggu 25 Desember 2022
pk 8.35 WIB di RSPI Bintaro, Tangerang Selatan
dalam Usia 80 Tahun

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta
menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya
Amin



Habib Aboe Bakar Alhabsyi
Sekjen DPP PKS

Belanda Kembali Minta Maaf

HNW Dorong Pemerintah Tuntut Pengakuan Kemerdekaan De Jure 17 Agustus

KUTIPAN

Jakarta (21/12) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi sikap Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dengan pengakuan dan permintaan maaf negaranya atas telah terjadinya perbudakan di wilayah-wilayah atau negara koloni Belanda di masa lalu.

Hidayat juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk membicarakannya spesifik perbudakan dan pelanggaran HAM yang dulu dilakukan Belanda terhadap warga Indonesia, serta secara serius juga menuntut agar kerajaan Belanda tidak hanya meminta maaf dan mengakui de facto kemerdekaan RI tetapi juga segera mengakui secara resmi dan de jure kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia dari penjajahan Belanda adalah pada tanggal 17 Agustus 1945,

bukan tanggal 27 Desember 1949.

“Permohonan maaf seperti itu tentu diapresiasi, walaupun sudah pernah disampaikan, dan walaupun kini disampaikan secara umum untuk negara-negara koloni Belanda di masa lalu. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Kemlu perlu menindaklanjuti bagaimana sikap Belanda terkait spesifik Indonesia di masa lalu, baik terkait masalah perbudakan, pelanggaran HAM, lalu tindak lanjut permohonan maaf tersebut, juga pengakuan de

jure atas kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia pd 17 Agustus 1945”ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (21/12).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa permohonan maaf ini memang ditujukan secara umum terhadap negara-negara koloni Belanda di masa lalu. Oleh karenanya, perlu dibahas secara spesifik mengenai Indonesia.

“Bagaimana sikap Belanda terkait Indonesia di masa penjajahan Belanda? Ada banyak yang perlu diklarifikasi dan kepentingan Indonesia perlu diperjuangkan,” tukasnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa sikap permohonan Belanda ini bukan kali yang pertama. Raja Belanda pada 10 Maret 2020 dan PM Rutte pada 17 Februari 2022 sebelumnya juga telah meminta maaf atas kekerasan ekstrem yang dilakukan militer Belanda pada periode 1945 sampai dengan 1949.

“Lalu, bagaimana dengan



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

“Momentum ini perlu digunakan Kemlu untuk menuntut pengakuan secara de jure tersebut. Agar tidak hanya berkali-kali Belanda meminta maaf, tetapi tidak meminta maaf kepada Indonesia karena baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 secara de facto saja, belum mengakuinya secara de jure,”

kekerasan dan pelanggaran HAM pada periode sebelum 1945, yakni periode penjajahan, dimana banyak rakyat Indonesia (Nusantara) yang tewas akibat tindak

kolonialisme kerajaan Belanda, seperti melalui tanam paksa, kerja rodi dll?” tukasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dapat Nomor Urut 8, Presiden PKS: Mari Kita Kawal Pemilu yang Jurdil, Damai dan Demokratis

KUTIPAN

Jakarta (14/12) --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor urut peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendapatkan nomor urut delapan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul bersyukur salah satu tahapan Pemilu 2024 telah dilalui. Ia juga senang PKS kembali mendapatkan nomor urut delapan seperti pada Pemilu 2019.

Syaikhul mengapresiasi gelaran penetapan nomor urut penentuan hasil Pemilu 2024 dan berharap semua proses hingga pelaksanaan Pemilu serta penetapan hasil Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, damai dan demokratis.

"Mari kita dukung selalu agar penyelenggara pemilu, baik KPU, BAWASLU, maupun DKPP dapat menjalankan tugasnya secara independen, netral, dan profesional. Mari

kita kawal bersama Pemilu Serentak 2024 agar tidak ada kecurangan, manipulasi, dan segala macam bentuk pelanggaran lainnya. Mari wujudkan pemilu yang luber, jurdil, damai dan demokratis," pesan Syaikhul.

Syaikhul menambahkan, PKS sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu 2024 berkomitmen penuh menjalankan seluruh tahapan pemilu secara bermartabat.

Pihaknya akan melawan setiap bentuk politik transaksional dengan politik gagasan dan pemberdayaan serta menghilangkan polarisasi dengan kolaborasi.

"PKS akan melawan setiap

bentuk politik transaksional melalui politik gagasan, menentang politik uang melalui politik pemberdayaan, dan hilangkan politik polarisasi menjadi politik kolaborasi. Mari sukseskan Pemilu Serentak 2024, untuk kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat," tegasnya.

Tak lupa Presiden PKS menyampaikan pantun atas hasil penetapan nomor urut peserta pemilu 2024.

Mari kawan kita rekreasi
Ramai-ramai ajak sahabat |
Mari kawan kita jalin kolaborasi
Wujudkan pemilu yang
bermartabat

Indah panorama di
pegunungan | Membuat hati
menjadi tenang | Mohon doa
dan dukungan | Nomor 8 PKS
menang



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

"Mari kita dukung selalu agar penyelenggara pemilu, baik KPU, BAWASLU, maupun DKPP dapat menjalankan tugasnya secara independen, netral, dan profesional. Mari kita kawal bersama Pemilu Serentak 2024 agar tidak ada kecurangan, manipulasi, dan segala macam bentuk pelanggaran lainnya. Mari wujudkan pemilu yang luber, jurdil, damai dan demokratis,"



PKS Ditetapkan Nomor Delapan,

Sekjen: Alhamdulillah Tahapan Pemilu Berjalan, Hapus Wacana Penundaan

KUTIPAN

Jakarta (14/12) --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mendapatkan nomor urut delapan untuk kontestasi pesta demokrasi 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Habib ABoe Bakar Alhabsy menyambut baik gelaran pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu 2024.

Hal ini berarti ada jaminan bahwa Pemilu 2024 akan terus digelar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sekaligus mengikis wacana penundaan Pemilu serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Hari ini KPU sudah menetapkan 17 partai politik peserta pemilu beserta no urutnya. Ini tentunya akan membawa kelegaan untuk masyarakat, karena ini pertama Pemilu akan tetap digelar 2024. Sekaligus menepis adanya wacana

penundaan pemilu untuk beberapa tahun," papar Habib ABoe Bakar seusai penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Habib ABoe berharap, KPU sebagai penyelenggara Pemilu tetap konsisten untuk menjalankan seluruh tahapan Pemilu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

"Kita berharap KPU terus konsisten menyelenggarakan semua tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Sehingga iklim demokrasi di Indonesia akan terus terjaga dengan baik," papar Habib ABoe.

la menambahkan, Pemilu

adalah sarana rakyat menitipkan amanah dan haknya yang sudah diatur dalam tata perundangan dilakukan secara periodik sesuai dengan masa jabatan. Sebab itu, Pemilu yang lancar dari sisi pelaksanaan adalah perwujudan nyata dari demokrasi Indonesia.

"Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, oleh karenanya suksesi kepemimpinan melalui pemilu harus selalu dijaga siklusnya. Jangan sampai ada upaya untuk melanggar konstitusi yang kita miliki," kata dia.

Terakhir, Habib ABoe menyambut baik nomor delapan yang didapatkan PKS seperti pada Pemilu 2019 lalu. Ia pun memberikan pantun atas penetapan delapan sebagai nomor urut PKS pada Pemilu 2024.

"Adek Manis Membawa Nampian | Nampian Berisi Kue dan Madu | Ayo Bersama PKS Nomor Delapan | Indonesia Sejahtera dan Maju," papar Habib ABoe.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"Kita berharap KPU terus konsisten menyelenggarakan semua tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Sehingga iklim demokrasi di Indonesia akan terus terjaga dengan baik,"

Anugerah Keterbukaan
Informasi Publik 2022 KI Pusat

PKS Raih Peringkat Parpol Informatif

KUTIPAN

Jakarta (14/12) --- Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Atria Gading Serpong Tangerang, Banten, pada Rabu (14/11/2022).

KI Pusat pada 2022 ini telah mengawal pelaksanaan UU KIP yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kepada 372 Badan Publik. Hal ini juga dalam rangka menjalankan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam kegiatan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif, atau mendapatkan predikat tertinggi sebagai salah satu badan publik dari unsur partai politik.

Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi hadir dalam kegiatan tersebut menerima penghargaan.

Habib Aboe menyatakan

bahwa PKS bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan.

"Penghargaan ini kami anggap sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat bagi PKS untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui tata kelola partai politik yang lebih modern dan informatif sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-undang," ujar Habib Aboe.

PKS, tambah Habib Aboe, akan terus meningkatkan pelayanan di berbagai bidang layanan yang dapat diberikan oleh PKS, baik di parlemen, pemerintahan, maupun kehadiran di tengah masyarakat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"Penghargaan ini kami anggap sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat bagi PKS untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui tata kelola partai politik yang lebih modern dan informatif sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-undang,"



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV-DPR-RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***